



Panduan Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Sanitasi Sekolah

PPSP | Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Permukiman



Kegiatan Belajar Siswa SD Inpres Warsansan, Biak Numfor, Papua

Sakit itu Penting

Pengantar

Upaya mencapai target akses universal untuk air minum dan sanitasi sesuai RPJMN 2015–2019 berhadapan dengan tantangan berat. Pertama, kesenjangan (*gap*) akses yang sangat tinggi antara yang ada saat ini dengan target 100% yang hendak dicapai pada akhir 2019. Kedua, adanya *gap* pendanaan (kecilnya kapasitas fiskal), kurangnya kapasitas sumberdaya manusia dan rendahnya pengetahuan/kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat.

Pada sisi lain, Pemerintah memiliki dasar dan pijakan kuat untuk melaksanakan pembangunan sanitasi pada lima tahun ke depan. Melalui program PPSP, pemerintah berhasil mendorong kabupaten/kota menyusun dokumen perencanaan strategis pembangunan sanitasi (SSK). Dalam dokumen SSK tersebut kabupaten/kota menetapkan target pembangunan sanitasi dalam kurun lima tahun, dimana sebagian telah menyesaikannya dengan target akses universal.

Momentum ini patut dimanfaatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memberi perhatian pada kualitas layanan sanitasi di sekolah. Sanitasi bukan satu-satunya faktor penentu kualitas kesehatan (lingkungan) sekolah. Ketersediaan layanan air bersih, pemahaman, sikap dan perilaku warga sekolah (PHBS) juga menentukan bagaimana kualitas lingkungan sekolah.

Terkait hal ini pemerintah daerah memerlukan bimbingan dan panduan tentang bagaimana membangun sanitasi sekolah yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan bimbingan teknis, pendampingan, dan supervisi. Misalnya dengan menyiapkan panduan yang dapat dilaksanakan kabupaten/kota untuk menyiapkan perencanaan strategis pembangunan sanitasi sekolah.

Dalam konteks itulah dibutuhkan sebuah panduan yang jelas, yang dapat memandu kabupaten/kota (dengan bantuan fasilitator) menyiapkan dokumen perencanaan strategis sanitasi sekolah.

Ini bukan panduan teknis menyangkut, misalnya, bagaimana membangun toilet, bagaimana melaksanakan kegiatan PHBS, bagaimana mengelola sampah di sekolah. Intervensi-intervensi semacam itu sudah banyak dilakukan di lapangan seperti oleh: Unicef, GIZ, SNV, USAID, Mercy Corps., dan sebagainya. Fokus panduan ini adalah tentang bagaimana menyusun perencanaan strategis untuk memastikan pembangunan sanitasi di sekolah dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Panduan ini disusun dengan memuat tiga hal penting yang diadopsi di PPSP, yakni disusun oleh kabupaten/kota, mencakup seluruh sekolah dasar, menggunakan data aktual, dan komprehensif (komponen fisik dan PHBS). Kami berharap Panduan ini dapat membantu kabupaten/kota meningkatkan kualitas sanitasi di sekolah-sekolah dasar di daerah dan pada gilirannya memberi kontribusi besar pada peningkatan kualitas belajar-mengajar dan sumberdaya manusia (siswa).

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada UNICEF yang telah membantu penyusunan panduan ini.

Tim Penyusun

Daftar Isi

1	PENDAHULUAN	5
1.1	Substansi	6
1.2	Pengguna Panduan	6
1.3	Komponen	6
1.4	Lokus dan Penerima Manfaat	6
1.5	Pendekatan metoda	6
1.6	Fasilitasi	7
1.7	Sistematika Panduan	7
1.8	Proses, Milestone, dan Jadwal	8
1.9	Proses, Milestone, dan Jadwal	9
2	PERSAMAAN PERSEPSI	10
2.1	Penjelasan	10
2.2	Langkah-langkah	11
2.2.1	Langkah 1:Rakor Pokja	11
2.2.2	Langkah 2:Presentasi Substansi Perencanaan Strategi Sanitasi Sekolah	12
3	PEMETAAN SANITASI SEKOLAH	13
3.1	Penjelasan	13
3.2	Langkah-langkah	13
3.2.1	Langkah 1:Memahami Area Berisiko	13
3.2.2	Langkah 2:Memetakan Kondisi Sanitasi Sekolah	16
3.2.3	Langkah 3:Merumuskan permasalahan mendesak	18
4	STRATEGI JANGKA MENENGAH	21
4.1	Penjelasan	21
4.2	Langkah-langkah	21
4.2.1	Langkah 1:Perumusan Visi dan Misi	21
4.2.2	Langkah 2:Penetapan Tujuan dan Sasaran	22
4.2.3	Langkah 3:Konsolidasi RKJM, RKAS	22
4.2.4	Langkah 4:Perumusan Strategi Jangka Menengah dan Pentahapan	23
4.2.5	Langkah 5:Tahap Pencapaian	25
5	PROGRAM DAN KEGIATAN	28
5.1	Penjelasan	28
5.2	Langkah-langkah	28
5.2.1	Langkah 1:Merumuskan Program	28
5.2.2	Langkah 2:Menyusun Kegiatan	29
6	INTERNALISASI	34
6.1	Penjelasan	34
6.2	Langkah-langkah	35
6.2.1	Internalisasi Kegiatan Prioritas Tahun N+1	35
6.2.2	Internalisasi Kegiatan Prioritas Tahun N+2	36
6.2.3	Sosialisasi Kegiatan Jangka Menengah	37
7	KERANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI	38
7.1	Penjelasan	38
7.2	Langkah-langkah	38
7.2.1	Langkah 1:Penetapan Kriteria	38
7.2.2	Langkah 2:Penugasan dan Penanggung Jawab Kegiatan	39
7.2.3	Langkah 3:Evaluasi	40
7.2.4	Langkah 4:Lingkup Laporan	40

1. Pendahuluan

Kesehatan lingkungan sekolah berhubungan erat dengan kualitas pendidikan di dalamnya. Semakin bersih lingkungan sekolah, semakin besar pula dukungannya terhadap proses belajar-mengajar di sekolah tersebut. Para siswa dalam keadaan sehat, hidup dalam suasana tenang, dan yang lebih penting angka ketidakhadiran lantaran sakit bisa diturunkan.

UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 79 menegaskan: "Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas."

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, menyebutkan: "tujuan UKS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya."

Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan sekolah adalah perilaku warga sekolah terkait hidup bersih dan sehat serta ketersediaan fasilitas air bersih dan sanitasi. Secara khusus dapat dikatakan bahwa jika warga sekolah menerapkan standar pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan sekolah memiliki fasilitas yang memadai: air bersih, toilet layak, saluran air, tempat sampah serta tempat penampungan sementara, dan fasilitas untuk mencuci tangan, serta fasilitas untuk kebutuhan menstruasi, masalah kesehatan lingkungan akan terselesaikan.

Namun demikian masalah kesehatan lingkungan sekolah tidak sederhana. Banyak kendala yang dihadapi sekolah ketika harus mewujudkan amanat UU No. 36/2009 tersebut. Sebut saja masalah kapasitas sumberdaya manusia, keterbatasan dana, serta ketidakjelasan dan tumpang-tindihnya peraturan yang menyebabkan ketidaksinkronan pelaksanaan kegiatan di tingkat sekolah.

Banyak program telah dijalankan dan diujicobakan di sekolah. Misalnya dari Unicef, GIZ, USAID, Mercy Corps., dunia usaha, Kementerian Kehutanan dan LH, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Praktik-praktik baik dan kemajuan juga telah dihasilkan. Namun umumnya program-program tersebut berfokus pada intervensi aspek-aspek teknis seperti penyiapan toilet, tempat cuci tangan, mengolah sampah, dan sebagainya. Sedikit yang menyentuh aspek perencanaan, khususnya bagaimana menyiapkan perencanaan strategis di tingkat kabupaten/kota dan menjamin keberlanjutannya di sekolah.

Kelompok Kerja AMPL Nasional memiliki pandangan bahwa perlu bagi kabupaten/kota untuk menyusun satu dokumen perencanaan strategis pembangunan sanitasi sekolah agar setiap SD/MI, negeri/swasta, dijamin dapat mewujudkan lingkungan bersih dan sehat dalam jangka menengah lima tahun.

Panduan penyusunan Strategi Sanitasi Sekolah ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mewujudkan amanat UU No. 36/2009 tentang Kesehatan tersebut.

Panduan ini adalah panduan yang menuntun kabupaten/kota menjalankan proses/langkah untuk menghasilkan dokumen perencanaan (Sanitasi Sekolah) yang baik. Dokumen sanitasi sekolah yang dihasilkan, idealnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang disusun dalam tahun yang sama atau dokumen hasil pemutakhirannya.

Untuk menyusun dokumen strategis sanitasi sekolah, idealnya Pokja mendapatkan pendampingan seorang fasilitator yang berpengalaman dalam memfasilitasi daerah dalam proses perencanaan baik formal/reguler maupun perencanaan yang berbasis masyarakat.

1.1 Substansi

Panduan ini merupakan panduan proses untuk menyusun Dokumen Perencanaan Strategi Sanitasi Sekolah (SSS) yang berjangka menengah (lima tahun). Dokumen SSS merupakan bagian tidak terpisahkan dari atau sekadar melengkapi Dokumen SSK yang terlebih dahulu sudah disusun oleh kabupaten/kota. Diharapkan dokumen Strategi Sanitasi Sekolah ini juga mendapatkan pengesahan dari bupati/walikota.

Panduan ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah menyusun dokumen SSS yang dimulai dari (i) mengenali kondisi sanitasi di daerahnya (ii) menyusun strategi pendanaan, pemberdayaan, peningkatan kapasitas (iii) menyusun kegiatan dalam jangka lima tahun dan (iv) menginternalisasikannya ke dalam perencanaan formal untuk diimplementasikan.

Panduan ini tidak memuat aspek-aspek teknis yang menyangkut pelaksanaan satu kegiatan di sekolah, seperti: bagaimana membuat fasilitas CPTS yang baik, toilet yang sehat, atau poster kampanye yang efektif. Hal-hal teknis sudah dapat dipetik dari berbagai praktik baik program-program yang sudah berjalan.

1.2 Pengguna Panduan

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Penanggung jawab utama/koordinator)
- Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota
- Kelompok Kerja (Pokja) AMPL/Sanitasi atau kelompok kerja lainnya
- Dinas Kesehatan, yang mengemban amanat KMK No. 1429/Menkes/2006 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah
- Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
- Bappeda sebagai koordinator perencanaan di daerah, serta
- OPD lain anggota Pokja dalam rangka mensinkronkan kegiatan dengan lokus sekolah.
- Fasilitator pendamping Pokja di Kabupaten/Kota

1.3 Komponen

Pengembangan sanitasi di sekolah tidak dapat dipisahkan dari faktor ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi, pendidikan, dan inisiatif-inisiatif terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan demikian komponen yang menjadi lingkup Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah adalah:

- Aspek perilaku (PHBS)
- Air Minum. Yang dimaksud dengan air minum adalah air bersih yang hanya melalui sebuah proses pengolahan (misalnya merebus) sudah menjadi air layak diminum.
- Toilet/jamban termasuk *septic tank* atau IPAL
- Fasilitas cuci tangan
- Saluran air sebagai sistem drainase
- Tempat sampah dan tempat penampungan sementara (TPS)

1.4 Lokus dan Penerima Manfaat

Seluruh SD dan Mardasah Ibtida'iyah, negeri/swasta, di wilayah kabupaten/kota.

1.5 Pendekatan metoda

Panduan Strategi Sanitasi Sekolah mengadopsi metodologi yang diterapkan dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis di Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Dokumen-dokumen PPSP seperti Buku Putih dan SSK menyajikan kondisi sanitasi saat ini (pemetaan sanitasi) yang mampu menggambarkan secara jelas area berisiko, dan beberapa kota bahkan telah memiliki peta kondisi sanitasi sekolah.

Dokumen Perencanaan SSS ini dimaksudkan untuk melengkapi SSK dan diharapkan dapat menyelesaikan masalah sanitasi di sekolah, yang dalam SSK belum dirumuskan. Jika SSK mempunyai target pemenuhan *universal access*, maka Dokumen SSS merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup sekolah untuk peningkatan kualitas belajar-mengajar.

Berbeda dengan SSK yang menggunakan pendekatan: *gap analysis*, analisis SWOT lengkap, survai EHRA, penetapan area berisiko, dan berbagai *tools*, Panduan Strategi Sanitasi Sekolah lebih bersifat praktis karena persoalan sanitasi di sekolah relatif gamblang dan lokusnya pun terbatas.

Panduan ini hanya akan memanfaatkan area berisiko dalam SSK sebagai salah satu dasar penetapan prioritas, SWOT sederhana untuk perumusan strategi, dan *gap analysis* sebagai dasar penyusunan strategi dan kegiatan dalam kurun lima tahun.

Dokumen Perencanaan Strategis Strategi Sanitasi Sekolah ini juga mengadopsi strategi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam hal:

- Menumbuhkan kebutuhan (*demand creation*) melalui kampanye berskala kabupaten/kota dan pendidikan aspek PHBS di sekolah.
- Menciptakan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*), yaitu penyusunan Dokumen Perencanaan Strategi Sanitasi Sekolah yang (idealnya) juga diakui oleh kabupaten/kota sebagai buku induk perencanaan sanitasi sekolah.
- Menyediakan sarana/prasarana dengan mempertimbangkan prioritas, ketersediaan dana, dan kesiapan sumberdaya sekolah.

1.6 Fasilitasi

Yang juga penting adalah bagaimana kabupaten/kota, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama Pokja AMPL/Sanitasi, melaksanakan proses penyusunan Dokumen Perencanaan Strategi Sanitasi Sekolah. Mengingat amanat yang diberikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait penyusunan dokumen, ada baiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimasukkan sebagai salah satu anggota Pokja.

Idealnya, setiap kabupaten/kota mendapatkan pendampingan fasilitator yang terlatih dan berpengalaman bekerja dengan kabupaten/kota selama penyusunan dokumen hingga proses internalisasi ke dalam perencanaan formal. Jika tersedia sumberdaya, pendampingan dapat dilanjutkan di tahun berikutnya dengan fokus implementasi dan monev.

1.7 Sistematika Panduan

Panduan ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

- *Pertama*, Penjelasan Proses dan Output. Pada bagian ini Pokja akan dituntun langkah demi langkah. Setiap hasil, keputusan, dan penilaian yang dihasilkan dalam kerja dan rapat-rapat Pokja harus dicatat dan menjadi input atau bahan penulisan untuk bab-bab di dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sanitasi Sekolah.
- *Kedua*, Penjelasan Isi/Outline Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah. Bagian ini menjelaskan struktur dan deskripsi mendetail isi Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah. *Tiga*, Petunjuk Teknis. Pada dasarnya ini adalah lampiran dari Panduan (yang akan disusun dan dikembangkan seiring dengan pelaksanaan penyusunan dokumen di lapangan). Pada umumnya bersisi standar-standar tabel, kuesioner, *spreadsheet-based tools*, yang diperlukan oleh Pokja dalam menyusun Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah.

1.8 Proses, Milestone, dan Jadwal

Apabila kabupaten/kota belum memiliki SSK, penyusunan Dokumen SSS harus dilaksanakan beriringan dengan proses penyusunan/pemutakhiran SSK. Sesuaikan jadwalnya dengan jadwal penyusunan SSK. Proses di bawah ini bisa menjadi patokan jadwal penyusunan Strategi Sanitasi Sekolah.



©UNICEF Indonesia/2016/Irwin Fedriansyah

Kegiatan Menggosok Gigi dan Mencuci Tangan Siswa SDN Leuwipanjang, Kota Bandung, Jawa Barat

1.9 Outline Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah

Isi Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah adalah sebagai berikut

Pengantar

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Pemetaan Kondisi Sanitasi Sekolah

- Area Berisiko (dari SSK)
- Sebaran Sekolah di Area Berisiko
- Permasalahan mendesak

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Sekolah

- Visi dan Misi
- Tujuan dan Sasaran

Bab 4 Strategi Pengembangan Sanitasi Sekolah

- Konsolidasi RKJM, RKAS
- Perumusan Strategi dan Pentahapan
- Tahapan Pencapaian

Bab 5 Program dan Kegiatan

- Perumusan Program
- Usulan Kegiatan (N s/d – N+5)

Bab 6 Kerangka Pemantauan dan Evaluasi

- Indikator Sanitasi Sekolah
- Rencana Laporan Kegiatan Sekolah
- Rencana Monitoring dan Evaluasi

Bab 7 Penutup

2. Persamaan Persepsi

TUJUAN

1. Mendapatkan dukungan Kepala Daerah
2. Menyusun Rencana Kerja

OUTPUT

1. Dukungan tertulis Kepala Daerah (bisa diwakilkan pada Ketua Pokja).
2. Rencana Kerja yang disepakati
3. Bahanpenulisan bagian Pengantar Dokumen

PELAKSANA

Bappeda (koordinator), Setda (pengarah), Dinas Dikbud (leading), Pokja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Anggota DPR yang membidangi.

WAKTU/ACARA

Satu bulan, akhir Februari – Satu kali rapat Pokja

2.1 Penjelasan

Penyamaan Persepsi adalah proses membangun kesepahaman diantara anggota Pokja. Tahap ini merupakan bentuk koordinasi awal antar-OPD menyangkut pembangunan sanitasi sekolah. Tidak sebatas anggota Pokja, pertemuan perdana ini sebaiknya juga menghadirkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan anggota DPR yang membidangi. Proses ini harus dilaksanakan sebelum kegiatan penyusunan dokumen.

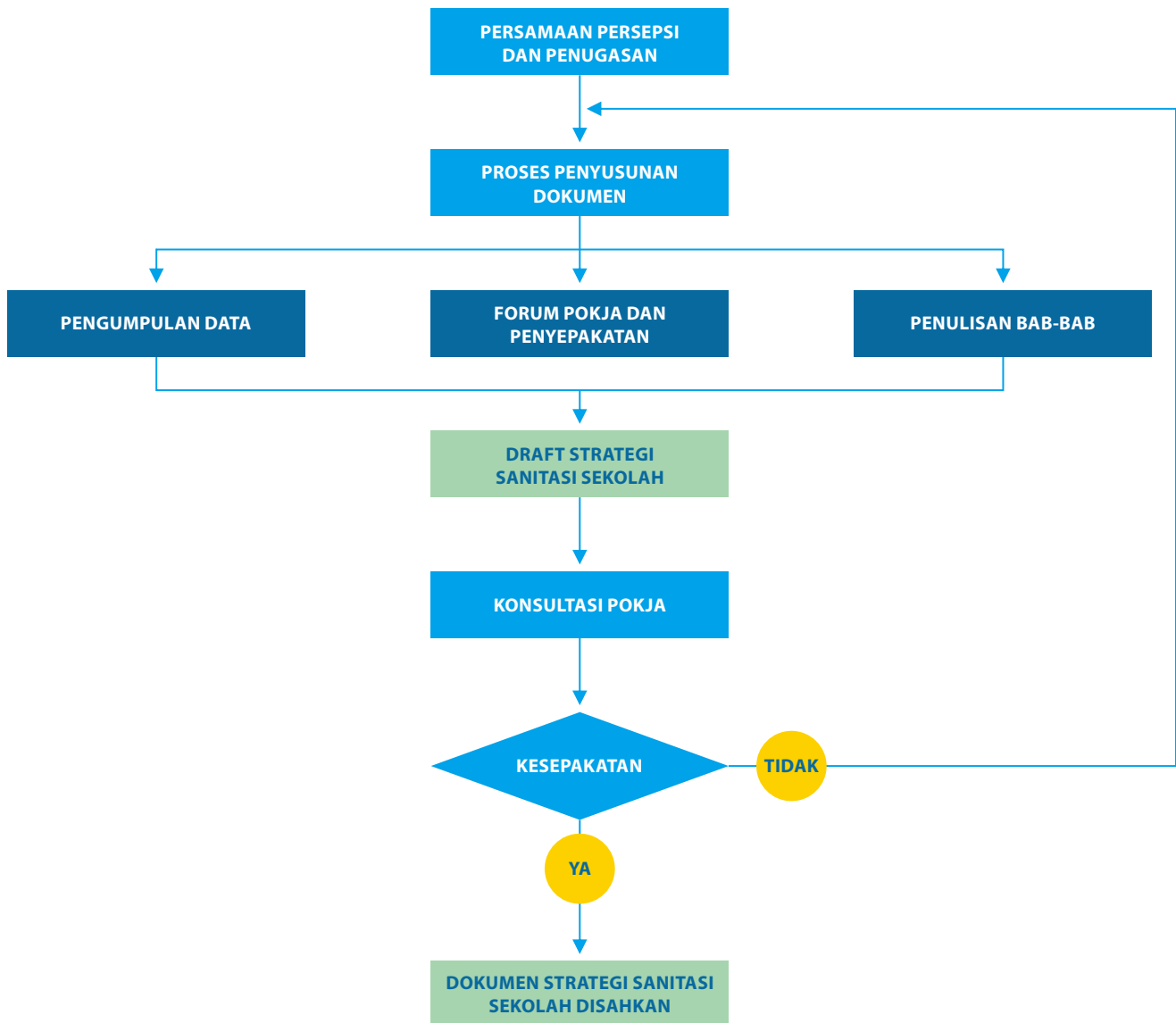
Mengingat sebagian besar anggota Pokja sudah terlibat dan memahami proses penyusunan dokumen PPSP: Buku Putih, SSK, dan MPS, maka proses ini hanyalah forum penegasan Ketua Pokja AMPL/Sanitasi untuk menugaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi penanggung jawab penyusunan Dokumen SSS.

Forum ini sebenarnya sekaligus merupakan ajang advokasi dan komunikasi antara Pokja dengan BPKAD serta kalangan DPRD yang membidangi sanitasi, khususnya sanitasi sekolah. Harapannya ialah agar DPRD dapat memberikan dukungan politik yang pada gilirannya membantu peningkatan alokasi pendanaan untuk pembangunan sanitasi sekolah.

Penegasan ini diperlukan karena dalam prosesnya nanti, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan berkoordinasi dengan anggota Pokja. Penugasan ini perlu diformalkan melalui SK Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah mengingat Dinas Dikbud (biasanya) bukan anggota Pokja.

Disamping itu proses yang dihasilkan melalui rapat tersebut harus menghasilkan Rencana Kerja satu tahun yang disetujui Ketua Pokja dan dipahami seluruh anggota Pokja. Hasil diskusi dapat dijadikan input/bahan untuk penulisan Bagian Pengantar Dokumen SSS.

Secara skematik pelaksanaan penyusunan dokumen yang lebih menekankan proses advokasi yaitu: pelibatan anggota-anggota Pokja, *buy-in process*, penyesepakatan dapat digambarkan seperti di bawah.



Apabila draf dokumen Strategi Sanitasi Sekolah belum mendapatkan kesepakatan seluruh anggota Pokja, maka akan disempurnakan melalui forum Pokja juga. Perbaikannya dilakukan sesuai kebutuhan saja, misalnya apakah perlu melakukan pelengkapan/penyempurnaan data atau sekadar menyunting draf (bab-bab) dokumen hingga akhirnya bisa disepakati sebagai draf akhir (lihat skema).

2.2 Langkah-langkah

2.2.1 Langkah 1: Rakor Pokja

Kepala Bappeda/Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pokja AMPL/Sanitasi mengadakan Rapat Koordinasi Pokja dengan mengundang seluruh anggotanya untuk membahas Rencana Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah.

2.2.2 Langkah 2: Presentasi Substansi Perencanaan Strategi Sanitasi Sekolah

Pada pertemuan tersebut Ketua Pokja menjelaskan secara garis besar apa yang dimaksud dengan Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah dan bagaimana proses penyusunannya (garis besarnya dapat dilihat pada Bagian Pendahuluan Panduan). Pastikan bahwa anggota DPRD yang hadir dapat memahami filosofi penyusunan dokumen ini. Agenda rapat difokuskan pada Proses 1, yakni Penyamaan Persepsi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat paparan ringkas untuk membangun pemahaman dan persepsi bersama yang memuat:

i. Manfaat Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah

Meskipun tidak berhubungan secara langsung dengan upaya mencapai 100% akses (*universal access*), tetapi sanitasi sekolah perlu mendapat perhatian serius mengingat ia mempengaruhi kualitas proses belajar-mengajar dan kesehatan siswa.

Harus disampaikan bahwa dengan proses ini seluruh anggota Pokja mengetahui dengan pasti peta sanitasi sekolah di daerahnya. Data yang nantinya diperoleh harus dipahami sebagai data sanitasi sekolah yang *valid*, dapat dipertanggungjawabkan, dan menjadi *database* untuk pembangunan sanitasi sekolah.

ii. Posisi Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah

Dokumen ini melengkapi BPS/SSK sehingga tidak memberlakukan dasar hukum baru. Dasar hukumnya sama dengan SSK yaitu SE Mendagri No. 660/2010 disamping RPJMD kabupaten/kota. Namun apabila secara eksplisit sanitasi sekolah belum disebutkan di RPJMD, maka dokumen yang dihasilkan di sini akan menjadi input untuk RKPD, Rencana Kerja SKPD, bahkan RPJMD. Untuk beberapa kabupaten/kota, sebenarnya sanitasi sekolah sudah masuk dalam kajian Buku Putih, meskipun strateginya tidak dibahas dalam SSK.

iii. Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Dikbud ini perlu diketahui seluruh anggota Pokja guna mendapatkan dukungan dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah untuk membangun sinergi di masa mendatang, khususnya dari Dinas-dinas: Kesehatan, LH, Agama, PU/Cipta Karya, Kebersihan.

Template Rencana Kerja formatnya sama dengan yang ditampilkan pada bagian Pendahuluan dengan menambahkan kolom "Jenis Kegiatan". Berikut adalah contoh Rencana Kerja Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah.

Proses dan Kegiatan	Tanggal	Hari Kerja	Penanggung jawab	Alokasi Dana	Sumber Dana	Pengumpulan Data	Pertemuan	Penulisan
Penyamaan Persepsi								
Dukungan Bupati						V		
Dukungan SKPD/Pokja								
Rencana Kerja								V
Pemetaan Kondisi Sanitasi Sekolah								
Area Berisiko						V		V
Dst.								

Tabel 2.1 Contoh Rencana Kerja Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Sekolah

3. Pemetaan Sanitasi Sekolah

TUJUAN

1. Memetakan sebaran SD dalam area berisiko
2. Merumuskan Permasalahan Mendesak

OUTPUT

Dituliskannya Bab II dokumen Strategi Sanitasi Sekolah termasuk tabel-tabelnya

PELAKSANA

Dinas Dikbud (leading) bersama Pokja

WAKTU/ACARA

Dua minggu – Pertemuan konsultasi dengan anggota Pokja

3.1 Penjelasan

Proses kedua pada dasarnya merupakan langkah-langkah untuk memetakan kondisi eksisting sanitasi, khususnya prasarana sanitasi, di sekolah-sekolah dasar. Pemetaan dimulai dengan mengumpulkan data. Data yang digunakan adalah yang tersedia di Dinas Dikbud, misalnya Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mutakhir.

Dalam pelaksanaannya data sekolah dikelompokkan per kelurahan karena kondisi sanitasi kabupaten/kota juga dikelompokkan berdasarkan kelurahan. Dinas Dikbud perlu melengkapi data tersebut dengan data air bersih, toilet guru dan siswa (termasuk sarana untuk kebutuhan kesehatan menstrual), *septic tank*/IPAL, tempat sampah, TPS, saluran air, fasilitas cuci tangan dan berwudhu.

Untuk mengetahui hubungan antara kondisi sanitasi sekolah dengan kondisi sanitasi kabupaten/kota, perlu digambarkan juga sebaran SD/MI yang ada di kelurahan-kelurahan yang termasuk dalam Peta Area Berisiko yang ada di dalam dokumen Buku Putih atau SSK.

Pada proses kedua ini, Dinas Dikbud diharapkan dapat merumuskan permasalahan mendesak sanitasi sekolah dengan memanfaatkan peta sanitasi sekolah dan peta area berisiko. Hasil dari proses ini akan dituangkan secara naratif dalam Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah sebagai Bab 2 – Pemetaan Sanitasi Sekolah.

3.2 Langkah-langkah

Ada tiga langkah yang harus dilaksanakan oleh Dinas Dikbud, terutama menyangkut pengumpulan data dan konsultasi dengan Pokja menyangkut penjelasan area berisiko. Pertama, menampilkan peta area berisiko untuk komponen air limbah domestik dan persampahan. Kedua, memetakan kondisi sanitasi sekolah. Ketiga, mengidentifikasi masalah mendesak dan merumuskan strategi jangka pendek (satu tahun).

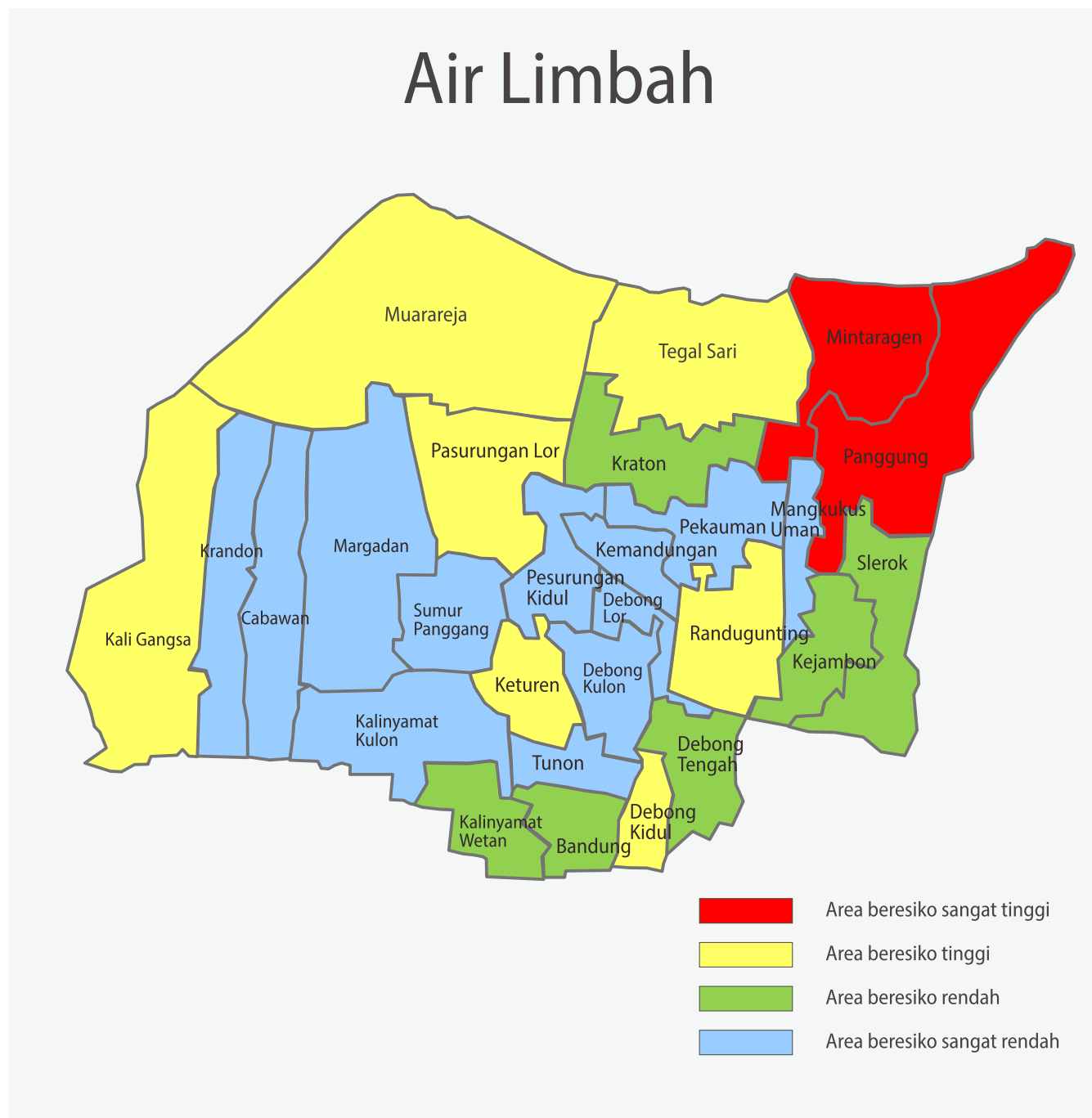
3.2.1 Langkah 1: Memahami Area Berisiko

Dinas Dikbud hanya perlu menyalin peta area berisiko yang ada di Buku Putih atau SSK (pemukhiran) untuk mengetahui tingkat risiko sanitasi di tiap-tiap kelurahan. Peta ini didapatkan dari pengolahan data sekunder, pengamatan lapangan, diskusi antar-stakeholder (persepsi SKPD), dan hasil survai *environmental health risk assessment* (EHRA) pada saat menyusun Buku Putih. Tiap kelurahan mempunyai tingkat risiko berbeda-beda, mulai dari risiko rendah hingga risiko sangat tinggi.

Dengan memahami area berisiko, Dinas Dikbud nantinya akan banyak terbantu ketika memetakan kondisi sanitasi sekolah-sekolah: apakah suatu SD/MI berada di wilayah berisiko tinggi atau rendah, misalnya.

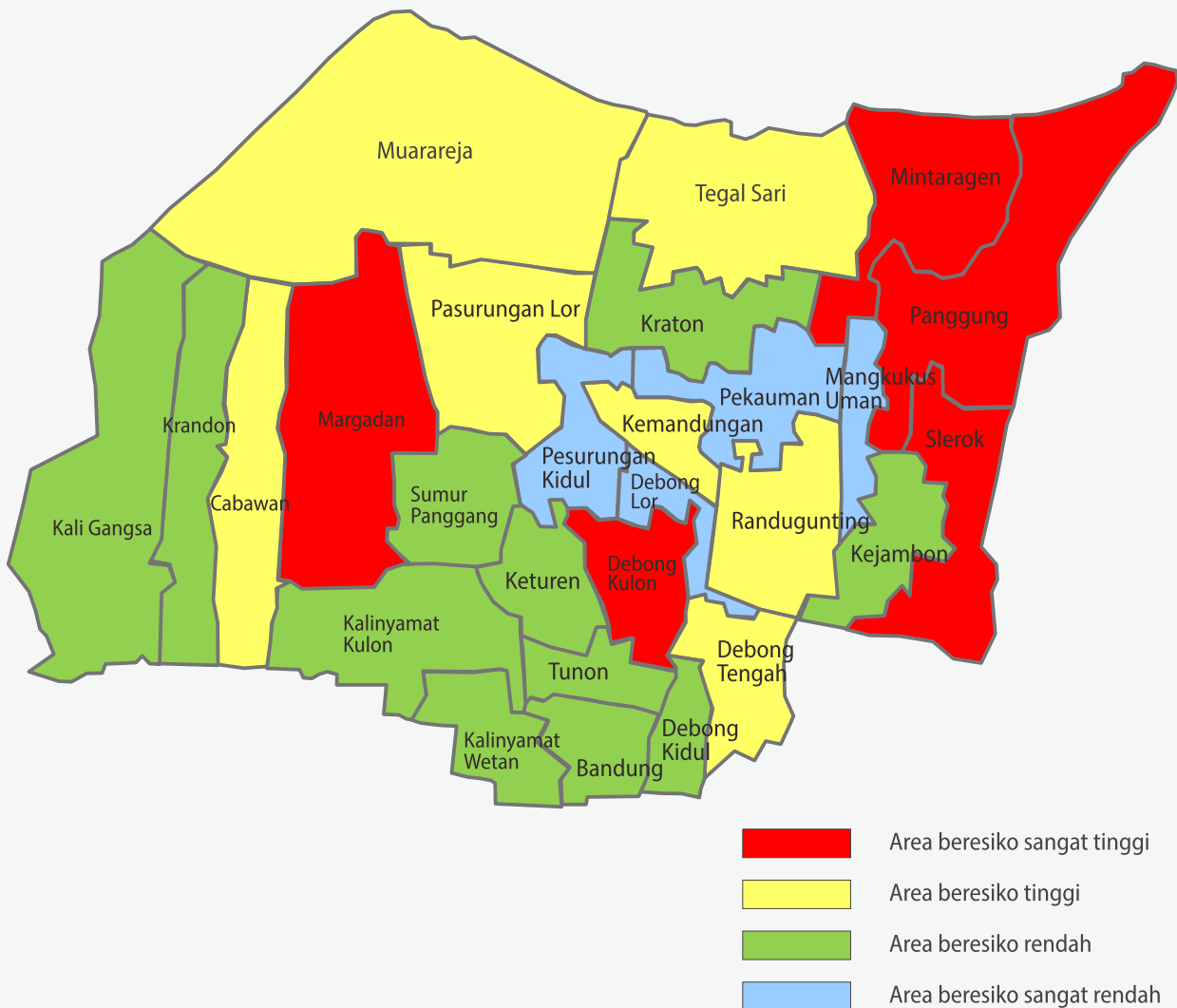
Disamping itu dengan menyandingkan (*overlay*) kedua pemetaan, dinas-dinas dapat mensinkronkan program/kegiatannya dengan kegiatan terkait sanitasi di sekolah. Disarankan Dinas Dikbud berkonsultasi dengan anggota-anggota Pokja yang memahami proses penentuan area berisiko, seperti dari Dinas Kesehatan, Kebersihan, dan Cipta Karya atau Permukiman.

Sebagai gambaran, berikut adalah contoh area berisiko untuk komponen air limbah dan persampahan yang diambil dari Buku Putih Kota Tegal:



Gambar 3.1 Peta ilustrasi area berisiko sanitasi air limbah domestik

Persampahan



Gambar 3.2 Peta ilustrasi area beresiko sanitasi persampahan

Area berwarna merah merupakan kelurahan-kelurahan yang memiliki resiko sangat tinggi. Sedangkan warna hijau menunjukkan kawasan beresiko rendah. Perlu juga dilakukan cek-ulang ke lapangan tentang validitasnya jika data Buku Putih tersebut diambil lebih dari lima tahun sebelumnya.

Sekolah-sekolah yang berada di kawasan warna merah atau resiko sangat tinggi dapat dipandang sebagai sekolah-sekolah yang beresiko tinggi pula (meskipun tidak selalu) dan pantas mendapatkan perhatian lebih.

Susun daftar sekolah yang berada dalam area beresiko tinggi dan kelompokkan berdasarkan kelurahan. Nantinya sekolah-sekolah ini akan menjadi prioritas utama kegiatan sanitasi sekolah. Tabel di bawah ini dapat digunakan untuk menyusun data sekolah yang dianggap mendapat prioritas penanganan kondisi sanitasinya.

No.	Komponen	Ya/Tidak	Skor	Nilai
1.	Kelurahan A	SDN Alfa 1	V	V
		SDN Alfa 2	V	
		SDN Alfa 3	V	
		Dst.		
2.	Kelurahan B			
		Dst.		

Tabel 3.1 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Area (Kelurahan) Berisiko

3.2.2 Langkah 2: Memetakan Kondisi Sanitasi Sekolah

Langkah berikutnya adalah memetakan kondisi sanitasi sekolah saat ini. Hal ini dilakukan untuk seluruh sekolah SD/MI negeri dan swasta di kabupaten/kota. Dinas Dikbud dapat mengerahkan SD-SD di kabupaten/kota untuk melakukan pemutakhiran data dengan mengisi lembar-lembar pertanyaan (kuesioner). Dinas Dikbud dapat memandu sekolah agar mengisi kuesioner tersebut dengan teliti dan seakurat mungkin. Mengingat sekolah lokusnya sempit dan jelas dan tidak sekompleks permasalahan sanitasi di wilayah permukiman, maka proses pengumpulan data dan pemetaannya pun diharapkan akan lebih sederhana.

i. Profil sekolah.

Kumpulkan dan manfaatkan data profil sekolah yang ada di Dinas (Dapodik) dan kelompokkan berdasarkan kelurahan. Pastikan datanya memuat sekurang-kurangnya: Nama sekolah, Jumlah Kelas, Jumlah Guru (L/P), Jumlah siswa (L/P). Data ini biasanya tersedia dengan mendetail di Dinas Pendidikan, sehingga tinggal mengkonsolidasikan saja. Tuangkan dalam bentuk tabel.

ii. Profil komponen sanitasi sekolah.

Lengkapi dengan data berikut: data air minum, toilet guru dan siswa, *septic tank*/IPAL, tempat sampah, TPS, saluran air, fasilitas cuci tangan dan berwudhu. Perhatikan juga apakah toilet yang tersedia juga memiliki fasilitas yang mendukung pengelolaan menstruasi, seperti: cermin, gantungan, dan tempat sampah (menstrual). Jika belum tersedia buatlah kuesioner sederhana untuk mengumpulkan data tersebut. Sebar ke sekolah-sekolah untuk diisi dan kumpulkan hasilnya. Nantinya hasil akhirnya harus dapat disajikan seperti tabel di bawah ini.

Kelurahan Gunung Batu (Contoh)	Jumlah Siswa		Jumlah Guru		Sumber Air bersih								Toilet Siswa			Fas. Cuci Tangan		TPS		Saluran Air/ Drainase		
	P	L	P	L	Sumur Terlindungi	Sumur Tak Terlindungi	Perpipaan	Mata Air Terlindungi	Mata Air Tak Terlindungi	Air Hujan	Sungai	Air Dalam Kemasan	P	L	TT	P	L	P	L			
SD 01																						
SD 02																						
SD 01																						
Dst.																						

Keterangan:

L : Laki-laki; P : Perempuan; TT : Tidak Terpisah

Tabel 3.2 Kondisi Prasarana Sanitasi Sekolah Berdasarkan Kelurahan

iii. Konsolidasi data per kelurahan.

Data sekolah (SD/MI) dikelompokkan berdasarkan kelurahan (sertakan juga dalam Lembar Lampiran Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah). Susun data konsolidasi sekolah per kelurahan ke dalam tabel seperti Tabel 3.3 di bawah yang pada dasarnya menggambarkan kondisi prasarana sanitasi di sekolah-sekolah. Namun demikian ia belum menggambarkan apakah kondisi sanitasi sekolah-sekolah tersebut baik, sedang, atau buruk.

Kelurahan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa		Jumlah Guru		Sumber Air bersih								Toilet Siswa			Fas. Cuci Tangan		TPS		Saluran Air/ Drainase
		P	L	P	L	Sumur Terlindungi	Sumur Tak Terlindungi	Perpipaan	Mata Air Terlindungi	Mata Air Tak Terlindungi	Air Hujan	Sungai	Air Dalam Kemasan	P	L	TT	P	L	P	L	
Kelurahan A																					
Kelurahan B																					
Kelurahan C																					
Dst.																					

Keterangan:

L : Laki-laki; P : Perempuan; TT : Tidak Terpisah

Tabel 3.3 Kondisi Prasarana Sanitasi Sekolah Berdasarkan Kelurahan

iv. Self assessment oleh sekolah.

Untuk mendapatkan pemetaan sanitasi sekolah secara lengkap, Dinas Pendidikan (dan Pokja) harus menilai kondisi sanitasi tiap-tiap sekolah dan untuk setiap komponen. Jika perlu, masing-masing komponen diberi bobot sesuai kesepakatan Pokja untuk mendapatkan penilaian gabungan (*composite*).

Penilaian kondisi tiap-tiap komponen sanitasi dilakukan oleh setiap sekolah secara *bottom up* melalui penilaian mandiri (*self assessment*) dengan menggunakan kriteria yang disiapkan. Penilaian mandiri dapat menggunakan *spread sheet tools* sederhana dan sekolah hanya memberi tanda “centang” untuk memberikan penilaian.

Berikut adalah contoh Formulir Isian untuk melakukan *self assessment* yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Harus dipastikan bahwa indikator yang digunakan sesuai dengan indikator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan di Pusat Data dan Statistik Pendidikan. Nantinya pemantauan/monitoring didasarkan pada indikator *self-assessment* dan hasilnya dapat digunakan Pokja sebagai data pembandingan Dapodik atau sebagai alat verifikasi.

Komponen	Ya/Tdk	Skor	Nilai	Komponen	Ya/Tdk	Skor	Nilai
Toilet Guru		75.0%	Baik	Fasilitas Cuci Tangan		66.7%	Cukup
Dipisah L & P	YA			Tersedia	YA		
Tersedia Air Memadai	YA			Tersedia Sabun	YA		
Selalu Bersih	TIDAK			Sesuai Jumlah Kelas/Lebih banyak	TIDAK		
Terhubung ke Septic Tank/IPAL	YA			Pengelolaan sampah		40%	Buruk
Toilet Murid		33.4%	Buruk	Tersedia tempat sampah per ruangan	YA		
Dipisah L & P	YA			Sampah dibersihkan setiap hari	YA		
Jumlah Toilet P sesuai 1:50	TIDAK			Setiap ruang disapu/pel tiap hari	TIDAK		
Jumlah Toilet L sesuai 1:60	YA			Tersedia TPS	TIDAK		
Tersedia Air Memadai	TIDAK			TPS diangkut maksimum 3 per hari	TIDAK		
Selalu Bersih	YA			Saluran Air		75%	Baik
Terhubung ke Septic Tank/IPAL	YA			Saluran air dari fasilitas Cuci Tangan	YA		
Sumber air Bersih		66.7%	Cukup	Saluran air dari Kamar Mandi (bukan toilet)	YA		
Tersedia Sumber Air (lihat Tabel 3.2)	YA			Saluran air untuk menampung limpasan hujan	YA		
Tersedia Sepanjang Hari	YA			Saluran selalu dibersihkan	TIDAK		
Kualitasnya Bagus	TIDAK						
Fasilitas terkait Menstruasi		66.7%	Cukup				
Tersedia Tempat Sampah (menstrual)	YA						
Tersedia Cermin	YA						
Tersedia Gantungan	TIDAK						

Tabel 3.4 Ilustrasi Formulir Isian *Self-Assessment* Penilaian Kondisi Sanitasi oleh Sekolah (per Sekolah) – Misalnya SD Banjar Mukti 01, Kelurahan Sukatani

v. *Pemetaan sanitasi sekolah.*

Selanjutnya konsolidasikan data dari tiap-tiap sekolah. Kelompokkan dalam kelurahan. Susun tabel konsolidasi berikut untuk menggambarkan kondisi riil (pemetaan) sanitasi sekolah di seluruh wilayah kabupaten/kota berdasarkan komponen. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, harus memberi perhatian lebih serius pada komponen-komponen sanitasi yang nilainya buruk atau sedang.

Komponen	Kondisi Sanitasi		
	% Baik	% Cukup	% Buruk
Toilet Guru			
Toilet Siswa			
Sumber Air Bersih			
Fasilitas Cuci Tangan dan Wudhu			
Tempat Penampungan Sementara (TPS)			
Saluran Air (drainase)			
Pendidikan dan Praktek PHBS			

Tabel 3.5 Konsolidasi Kondisi Sanitasi Sekolah per Kelurahan - Kelurahan Harja Mukti

Komponen	Kondisi Sanitasi		
	% Baik	% Cukup	% Buruk
Toilet Guru			
Toilet Siswa			
Sumber Air Bersih			
Fasilitas Cuci Tangan dan Wudhu			
Tempat Penampungan Sementara (TPS)			
Saluran Air (drainase)			
Pendidikan dan Praktek PHBS			

Tabel 3.6 Konsolidasi Kondisi Sanitasi Sekolah per Kabupaten



©UNICEF Indonesia/2011

3.2.3 Langkah 3: Merumuskan permasalahan mendesak

Setelah berhasil memetakan kondisi sanitasi sekolah di seluruh wilayah kabupaten/kota, tugas selanjutnya adalah mengidentifikasi (i) isu-isu strategis sanitasi sekolah dan (ii) permasalahan mendesak.

Isu strategis dapat dipandang sebagai hal-hal (positif/negatif) yang memiliki peran menentukan/dominan kualitas sanitasi di sekolah. Sedangkan permasalahan mendesak sanitasi sekolah adalah persoalan yang harus ditangani segera, yang antinya akan menuntun pada penyusunan kegiatan prioritas yang sifatnya *quick win* dan dilaksanakan di Tahun N+1.

vi. Rumuskan isu strategis

Adakan mini FGD yang melibatkan anggota Pokja termasuk anggota dari Bappeda. Tujuan FGD ini adalah untuk menggali isu-isu strategis terkait sanitasi sekolah yang sangat bermanfaat bagi kabupaten/kota untuk menyusun strategi perencanaan sanitasi sekolah dalam lima tahun mendatang. Secara ringkas FGD dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Dikbud mengundang anggota Pokja dan Bappeda (boleh juga ditambah beberapa kepala sekolah/penilik sekolah) dalam sebuah FGD. Jelaskan maksud diskusi, yakni (i) mengidentifikasi isu strategis terkait pembangunan sanitasi sekolah (ii) mengidentifikasi permasalahan mendesak.
- Bahas masing-masing komponen sanitasi sekolah (sampah, air limbah, air bersih, dll) dan pertimbangkan aspek-aspek: kelembagaan, pendanaan, kapasitas SDM, teknis, untuk tiap-tiap komponen. Rumuskan satu/dua kalimat pendek tentang isu strategis untuk komponen yang bersangkutan.

Ilustrasi Rumusan Isu/Permasalahan Strategis

- Contoh: "Dari pemetaan didapat bahwa sebagian besar SD tidak memiliki TPS, sampah yang terkumpul dari tempat sampah ditimbun dan dibakar."
- Dinas Dikbud dapat mengarahkan diskusi untuk mencari penyebab mengapa terjadi permasalahan tersebut ditinjau dari aspek: kelembagaan, pendanaan, kapasitas SDM, dan teknis.
- Rumuskan isu strategis yang dianggap paling mungkin menyelesaikan masalah. Misalnya, "Keterbatasan dana menyebabkan sekolah tidak mampu mengadakan fasilitas TPS", ATAU "Tidak perilaku siswa yang mendukung hidup bersih dan sehat di sekolah", dsb.

Lakukan pembahasan untuk seluruh komponen, deretkan isu-isu strategis tersebut, konsolidasikan, rumuskan ulang dan pilih beberapa isu saja yang dianggap paling strategis. Isu strategis yang teridentifikasi akan membantu Dinas Dikbud dan Pokja merumuskan strategi dan menyusun kegiatan dalam waktu lima tahun ke depan.

vii. Identifikasi permasalahan mendesak

Manfaatkan mini FGD tersebut juga untuk mengidentifikasi permasalahan mendesak, yaitu masalah sanitasi di sekolah yang membutuhkan penanganan segera dan jika tidak ditangani akan menimbulkan masalah lebih besar. Lakukan langkah-langkah berikut:

- Pilih hanya sekolah-sekolah yang ada di area berisiko tinggi. Jika area berisiko sangat tinggi banyak dan tersebar, pilih area berisiko tinggi dengan kepadatan penduduk paling tinggi. Area berisiko sangat tinggi biasanya juga merupakan area prioritas penanganan sanitasi permukiman, sehingga tidak salah jika kawasan ini dipilih.
- Dari data kondisi prasarana sanitasi sekolah (Tabel 3.3) berdasarkan kelurahan, identifikasi komponen apa saja yang kondisinya buruk di mayoritas sekolah. Pilih dua komponen sanitasi yang dianggap paling dominan (mengingat banyaknya keterbatasan seperti dana dan kapasitas SDM). Misalnya persampahan dan toilet. Rumuskan permasalahan mendesak sanitasi sekolah di area berisiko secara jelas.

viii. Rumuskan kegiatan-kegiatan quick win

Kegiatan *quick win* adalah kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan segera dan mudah dilaksanakan karena telah dianggarkan sebelumnya dalam rencana kerja (Renja) OPD atau dapat dimasukkan ke dalam revisi anggaran melalui APBD-P.

Untuk menentukan kegiatan-kegiatan *quick win*, pilih dua komponen saja. Misalnya sampah dan toilet/air limbah. Jika mungkin rumuskan kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan dilaksanakan pada tahun N (tahun penyusunan dokumen) di sekolah-sekolah yang teridentifikasi dalam APBD-P. Ini perlu dilakukan agar kabupaten/kota tidak kehilangan momentum dalam upaya peningkatan kualitas sanitasi sekolah.



© UNICEF Indonesia/2016/Irwin Fedriansyah

Fasilitas Toilet dan WC Sekolah SDN Leuwipanjang

No.	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Lokasi	Jumlah	Sumber Dana
1.	Kegiatan Tahun N (Quick-Win Activities)	-> Fokus di SD-SD di area berisiko			
1.1	Penyediaan Toilet Guru	Dikbud	SD a, b, c, dst	24	APBD, APBN
1.2	Penyediaan Toilet Murid Laki-laki	Dikbud	SD a, b, c, dst	40	APBD, APBN
1.3	Penyediaan Toilet Murid Perempuan	Dikbud	SD a, b, c, dst	30	APBD, APBN, CSR/Swasta
1.4	Penyediaan tempat sampah	Dikbud	SD a, b, c, dst	300	CSR/Swasta
1.5	Pembangunan TPS di Sekolah	Kebersihan	SD a, b, c, dst	15	APBD
1.6	Pencetakan dan Distribusi Poster CPTS	Dinkes	Seluruh SD	1.000	BOK
1.7	Pencetakan dan Distribusi buklet 3R di Sekolah	Dinkes	Seluruh SD	1.000	APBD
1.8	Pembenahan Saluran Air di Sekolah	Kebersihan			APBD
1.9	Penyediaan Fasilitas Cuci Tangan	Dinkes			CSR/Swasta
1.10	ToT untuk pendidikan PHBS di Sekolah	Dikbud	SD a, b, c, dst	50	Dikbud
1.11	Kampanye PHBS untuk Sekolah				
1.12	Dan sebagainya				

Tabel 3.7 Contoh Tabel Usulan Kegiatan pada Tahun N+1 (APBD)

Selanjutnya sajikan kegiatan yang diusulkan ke dalam sebuah tabel yang sekurang-kurangnya memuat informasi seperti tabel contoh di bawah. Segera internalisasikan usulan tersebut ke dalam proses/tahapan perencanaan dan penganggaran formal di kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya *quick win* atau memberikan dampak cepat dan langsung. Pertimbangkan faktor pendanaan, kapasitas SDM sekolah, dan aspek teknis (Lihat bagian 6.2.2 Panduan ini).

Pastikan bahwa usulan kegiatan *quick win* dilaksanakan di wilayah atau area berisiko yang ada di Buku Putih atau SSK. Dalam proses perencanaan dan penganggaran formal, komunikasikan usulan yang dihasilkan dari Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah ini ke SKPD-SKPD lain dan Bappeda. Bahkan jika perlu undang kalangan dunia usaha (swasta atau BUMD/BUMN) untuk terlibat dalam pendanaan kegiatan.

Dengan diselesaikannya tahap ini Dinas Dikbud atau Pokja dapat mendokumentasikan atau menuliskan hasilnya dalam "Bab 2 Pemetaan Kondisi Sanitasi Sekolah" Dokumen SSS.

4. Strategi Jangka Menengah

TUJUAN

1. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
2. Merumuskan Strategi Jangka Menengah Sanitasi Sekolah
3. Menetapkan Tahapan Pencapaian

OUTPUT

1. Disepakatinya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
2. Disepakatinya rumusan Strategi
3. Dituliskannya Bab III dan IV dokumen Strategi Sanitasi Sekolah

PELAKSANA

Dinas Dikbud (leading) bersama Pokja

WAKTU/ACARA

Satu bulan – Satu kali rapat Pokja

4.1 Penjelasan

Proses perumusan strategi jangka menengah sangat penting karena ini menentukan bagaimana kondisi sanitasi sekolah dalam kurun 5-10 tahun mendatang. Strategi pembangunan sanitasi sekolah jangka menengah dapat dirumuskan setelah pemerintah daerah merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sanitasi di daerahnya.

Perumusan strategi bukan semata menyangkut aspek penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di sekolah, melainkan juga bagaimana memastikan agar strategi tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pengembangan kebijakan dan peraturan, strategi pendanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dan kesadaran masyarakat adalah aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam strategi yang dikembangkan.

4.2 Langkah-langkah

4.2.1 Langkah 1: Perumusan Visi dan Misi

Visi Sanitasi Sekolah: Visi merupakan konsisi ideal yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi sanitasi sekolah dengan demikian harus diposisikan sebagai *kondisi sanitasi yang diharapkan di sekolah dalam kurun waktu lima tahun*. Secara gramatika visi digambarkan dalam sebuah kalimat pasif. Secara praktis, visi dapat dikatakan sebagai *“rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan”*.

Visi sanitasi sekolah harus menjadi bagian dari visi kabupaten/kota yang ditegaskan dalam RPJMD dan sekaligus merupakan pelaksanaan amanat UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 79 yakni terciptanya: *“... lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.”*

Misi Sanitasi Sekolah: Berbeda dengan visi yang menggambarkan keadaan yang diinginkan, misi menggambarkan upaya-upaya untuk mewujudkan visi secara ideal. Perumusan misi sanitasi sekolah harus mempertimbangkan aspek sarana/prasarana dan aspek kesadaran warganya (pola hidup bersih dan sehat). Karena itu misi biasanya tidak tunggal.

Secara gramatika misi digambarkan dalam sebuah kalimat aktif. Secara praktis, misi merupakan *“rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”*.

Untuk menetapkan rumusannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan beberapa rumusan visi dan misi sebagai bahan diskusi Pokja guna membangun kesepahaman dan mendapatkan persetujuan. Visi dan misi yang disepakati ini menjadi dasar bagi Dinas Dikbud untuk menetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan sanitasi sekolah di masing-masing.

4.2.2 Langkah 2: Penetapan Tujuan dan Sasaran

Rumusan Tujuan: "Tujuan" dapat digambarkan sebagai *suatu kondisi nyata yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pernyataan visi dan misi.*

Untuk merumuskan Tujuan, Pokja dapat menggunakan daftar "Isu dan Permasalahan Strategis" yang berhasil diidentifikasi sebelumnya sebagai dasar. Dengan mengoptimalkan atau mengatasi isu/permasalahan strategis tersebut, peluang untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan menjadi lebih terbuka.

Rumuskan "Tujuan" tersebut dalam kalimat-kalimat pasif yang mencerminkan keadaan-keadaan yang hendak dicapai. Berbeda dengan visi yang sifatnya umum, rumusan tujuan pembangunan sanitasi sekolah harus lebih spesifik dan dapat disajikan dalam beberapa poin.

Rumusan Sasaran: "Sasaran" menunjukkan hasil yang hendak dicapai secara nyata. Karena itu sasaran pembangunan sanitasi sekolah harus spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu" supaya tidak ambigu, tidak multi tafsir, dan masuk akal atau rasional.

Dinas Dikbud harus mendiskusikan perumusan tujuan dan sasaran ini dengan anggota-anggota Pokja bersamaan dengan pembahasan visi dan misi pembangunan sanitasi sekolah yang dibahas sebelumnya.

Selanjutnya, Tim Penulis Dokumen Sanitasi Sekolah dapat menuangkan proses perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran, dalam Bab 3 Dokumen Sanitasi Sekolah.

4.2.3 Langkah 3: Konsolidasi RKJM, RKAS

Setelah berhasil merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran, Dinas Dikbud perlu mengetahui modalitas yang dimiliki, yaitu perencanaan di tingkat sekolah dan aspek pendanaan. Langkah ini perlu ditempuh mengingat pelaksanaan pembangunan sanitasi sekolah dilaksanakan oleh sekolah berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan yang disusun sekolah.

Diantara dokumen-dokumen yang perlu ditelaah adalah Rencana Kerja Sekolah, baik yang sifatnya tahunan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) maupun rencana jangka menengah seperti Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM).

Pokja perlu melihat ulang apakah komponen sanitasi sekolah seperti penyediaan toilet, pengelolaan sampah, PHBS, sudah menjadi prioritas dalam RKJM dan RKAS. Telaah secara cepat dokumen-dokumen tersebut bersama-sama seluruh anggota Pokja untuk seluruh sekolah. Susun tabel kegiatan terkait sanitasi di kabupaten/kota dalam tabel seperti berikut:

	Komponen	Sumber Dana	Jumlah SD atau % terhadap Jumlah SD
A	Pengembangan budaya bersih dan sehat		
B	Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll		
C	Penyediaan sistem drainasi		
D	Penyediaan toilet		
E	Penyediaan tong sampah dan TPS		
	Dst. (lihat tabel-tabel sebelumnya)		

Tabel 4.1 Konsolidasi Kegiatan Terkait Sanitasi di SD/MI berdasarkan RKJM/RKAS (Lihat komponen Lingkungan Sekolah)



@UNICEF Indonesia/2016/Andi Arifani

Kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun di SDN 012 Buntu Terpedo, Luwu Utara, Sulawesi Selatan

Tabel tersebut sangat bermanfaat untuk mengetahui pemahaman dan perhatian sekolah-sekolah tentang isu-isu sanitasi. Tabel tersebut juga melengkapi hasil diskusi tentang Isu dan Permasalahan Strategis serta Permasalahan Mendesak.

Selanjutnya, dengan cukup lengkapnya data atau gambaran tentang kondisi sanitasi sekolah serta ditetapkannya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sanitasi sekolah, maka persoalan selanjutnya adalah bagaimana mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Segala langkah dan upaya untuk memenuhi tujuan dan sasaran tersebut harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis agar pembangunan sanitasi sekolah tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

4.2.4 Langkah 4: Perumusan Strategi Jangka Menengah dan Pentahapan

Langkah ini merupakan tahapan paling penting dalam proses penyusunan dokumen strategi jangka menengah sanitasi sekolah. Menetapkan strategi dalam kurun lima tahun dimaksudkan agar perencanaan pembangunan sanitasi sekolah dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Perlu diingat bahwa strategi harus mencakup aspek-aspek teknis (infrastruktur), pendanaan, kelembagaan, dan pemberdayaan atau peningkatan kesadaran.

Salah satu metoda yang kerap dipakai dalam penyusunan strategi (mencapai sasaran yang ditetapkan) adalah metoda SWOT sederhana. Metoda SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dianggap cukup mudah dilaksanakan dan dinas-dinas di kabupaten/kota sudah terbiasa menggunakan metoda ini.

Untuk mengurangi kerumitan, analisis dengan metoda SWOT ini akan disederhanakan ke dalam dua langkah; yaitu (i) dengan identifikasi isu-isu strategis yang dilakukan dengan pemberian bobot atas isu/permasalahan yang dianggap strategis dan (ii) melakukan analisis kuadran dan memilih strategi yang dianggap paling realistis dan efektif dalam konteks pengelolaan sanitasi di sekolah.

i. Pembobotan isu dan permasalahan strategis

Pada bagian terdahulu Pokja sudah berhasil mengidentifikasi isu/permasalahan yang dianggap strategis dalam perencanaan pembangunan sanitasi sekolah. Pada bagian ini Pokja perlu mengelompokkan isu/permasalahan tersebut berdasarkan aspek-aspek: infrastruktur, PHBS, pendanaan, serta kebijakan dan peraturan.

Urutkan isu-isu strategis tersebut berdasarkan yang paling dianggap strategis (diberi bobot paling besar). Selanjutnya posisikan isu-isu tersebut pada kuadran-kuadran diagram SWOT. Pilih satu, dua, atau tiga isu saja untuk masing-masing aspek SWOT. Jangan lebih dari tiga isu.

	KEKUATAN (STRENGTH – S) - Sebagian besar sekolah telah memasukkan komponen sanitasi, khususnya toilet dan tempat sampah, dalam RKAS - Ada Perda yang mengatur tentang lingkungan sekolah yang bersih dan sehat - Komitmen Bupati untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah	KELEMAHAN (WEAKNESS – W) - Alokasi dana untuk peningkatan lingkungan sekolah dan sanitasi hampir tidak ada, baik dari sumber DAK maupun DAU - Kapasitas guru atau komite sekolah tidak cukup untuk menyelenggarakan program untuk sanitasi sekolah - Tidak ada program/kegiatan kampanye PHBS untuk masyarakat
PELUANG (OPPORTUNITY – O) - Peluang pendanaan melalui BOS, BOK, DAK Sanitasi, CSR Keinginan komite sekolah untuk memperbaiki kondisi sanitasi - Adanya Dana Desa untuk peningkatan kualitas lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki saluran air di sekolah	Strategi S - O	Strategi W - O
ANCAMAN (THREAT – T) - Toilet tidak memadai, baik jumlah dan kondisinya - Pengaruh buruk masyarakat sekitar yang cenderung tidak peduli pada kesehatan lingkungan dan PHBS	Strategi S - T	Strategi W - T

Diagram Analisis SWOT

ii. Analisis kuadran dan menentukan strategi

Setelah Pokja berhasil memetakan isu/permasalahan strategis melalui pembobotan ke dalam diagram SWOT, maka selanjutnya adalah bagaimana menyusun strategi. Yang dimaksud strategi di sini adalah strategi pembangunan jangka menengah sanitasi sekolah, yaitu segala upaya menangani persoalan yang dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan.

Untuk menyusun strategi tersebut Dinas Dikbud bersama-sama Pokja harus duduk bersama untuk membahas. Pastikan diskusi ini melibatkan dan dipimpin ketua Pokja atau sekurang-kurangnya Ketua Bappeda sebagai penanggung jawab perencanaan. Tujuan diskusi adalah mendiskusikan dan menyepakati rumusan strategi.

- Diskusikan sekali lagi isu/permasalahan strategis yang dipilih dan diposisikan pada diagram SWOT sebagai pengantar diskusi dalam Pokja.
- Selanjutnya “kawinkan” substansi pada setiap kolom dengan substansi baris. Dengan demikian akan ada empat Kelompok Strategi (lihat diagram SWOT) yang dihasilkan: S-O, S-T, W-O, dan W-T.

- Susun hasil “perkawinan” yang mungkin didapatkan sesuai Kelompok Strategi. Pada tahap ini Pokja hanya perlu menuliskan rumusan “perkawinan” yang mungkin dan masuk akal, tanpa menyeleksi.

Boks: Contoh strategi yang dihasilkan:

- a. Strategi S-O: Memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang
 - (i) Memanfaatkan Perda dan komitmen Bupati untuk meningkatkan alokasi anggaran dari berbagai sumber, khususnya BOS, DAU, dan BOK untuk sanitasi sekolah (Strategi Pendanaan).
 - (ii) Memanfaatkan dokumen RKAS sebagai sumber perencanaan reguler (Strategi Perencanaan)
 - (iii) Dan sebagainya.
- b. Strategi W-T: Membenahi kelemahan untuk mengatasi ancaman
 - (i) Mengalokasikan/meningkatkan alokasi anggaran kampanye PHBS untuk masyarakat di lingkungan kumuh.
 - (ii) Dan sebagainya.

Lakukan seterusnya untuk strategi ST (mengoptimalkan kekuatan untuk menghilangkan ancaman) dan strategi W-O (menghilangkan kelemahan guna membuka peluang). Susun strateginya berdasarkan kelompok.

Selanjutnya, ini adalah bagian yang paling penting, Pokja perlu menyeleksi beberapa strategi dalam kelompok-kelompok strategi tersebut yang dinilai sebagai yang “paling strategis”. Jangan membuat strategi baru kecuali daftar yang dihasilkan melalui analisis SWOT.

Harus disadari bahwa dalam melakukan upaya mencapai tujuan dan sasaran, semakin banyak strategi tidak berarti semakin efektif. Sebaliknya dengan hanya memilih sedikit strategi yang tepat, kemungkinan mendapatkan hasil yang optimal justru lebih besar.

Tawarkan dalam rapat Pokja beberapa strategi tersebut (dari Kelompok Strategi mana saja) untuk didiskusikan. Pastikan pilih strategi yang benar-benar dianggap strategis, yaitu jika dipilih akan dapat menyelesaikan sebagian besar masalah (azas Pareto).

Pertimbangkan aspek-aspek seperti: kapasitas fiskal, kapasitas SDM, dan kondisi daerah secara umum. Pastikan strategi punya kemungkinan lebih besar untuk diterapkan tanpa menimbulkan masalah-masalah baru.

Setelah diskusi dan mendengarkan semua pendapat, pilih dua hingga tiga strategi dan tetapkan sebagai strategi pembangunan sanitasi sekolah. Rumuskan ulang jika perlu untuk mendapatkan kalimat yang lebih jelas dan tegas.

Tuangkan proses dan keputusan tentang perumusan isu strategis dan strategi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sanitasi sekolah yang disusun. Strategi yang telah disetujui ini nantinya menjadi dasar bagi Dinas Dikbud (Pokja) kabupaten/kota untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan pada bab-bab selanjutnya.

4.2.5 Langkah 5: Tahap Pencapaian

Yang dimaksudkan dengan tahapan pencapaian adalah tahapan yang harus ditempuh oleh kabupaten/kota untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di dalam dokumen ini. Tahapan ini juga harus ditulis atau didokumentasikan dalam Strategi Sanitasi Sekolah dengan harapan dokumen ini menjadi dasar perencanaan reguler pembangunan sanitasi di sekolah.

Langkah ini harus dilakukan agar program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan nantinya benar-benar efektif. Disamping itu mengingat banyak kendala dan keterbatasan yang dimiliki kabupaten/kota, maka daerah harus membuat prioritas program/kegiatan baik menyangkut aspek infrastruktur, peningkatan kesadaran (PHBS), atau kebijakan dan peraturan.

Pentahapan pembangunan sanitasi sekolah berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lain dan sangat bergantung pada sasaran yang telah ditetapkan. Tetapi secara umum prinsip penetapan pentahapan untuk pembangunan sanitasi sekolah harus memperhatikan (i) prioritas, misalnya dengan fokus pada sekolah-sekolah di area berisiko (ii) dukungan dana (iii) kapasitas sumberdaya yang tersedia. Tabel berikut ini adalah pedoman umum yang mungkin dapat dipertimbangkan bagaimana menyusun/menetapkan pentahapan pembangunan sanitasi sekolah.

Komponen Sanitasi Sekolah	Jangka Pendek (1 tahun)	Jangka Menengah (s/d 5 tahun)	Jangka Panjang (5 - 15 tahun)
Peningkatan Kesadaran PHBS Warga Sekolah	Ya (+)	Ya (+++)	Ya (+)
Penyediaan sumber air bersih	Ya (+)	Ya (+++)	Ya (++)
Penyediaan Toilet untuk Siswa dan Guru	Ya (+)	Ya (+++)	Ya (++)
Penyediaan Tong Sampah dan TPS Sekolah	Ya (+)	Ya (++)	Ya (+)
Pembangunan Saluran Air	Ya (+)	Ya (++)	Ya (++)
Penyediaan Fasilitas Cuci Tangan/Tempat Berwudhu	Ya (+)	Ya (+++)	Ya (++)
Kampanye PHBS dengan Pelibatan Sekolah: Lomba-lomba	--	Ya (++)	Ya (+)
Dst.	Hanya dilakukan di SD-SD prioritas	Dilakukan di SD-SD prioritas dan SD lain Tercapainya Sasaran Pembangunan Sanitasi Sekolah Jangka Menengah	Dilakukan di seluruh SD

Keterangan:

(+) : Sasaran tercapai di sedikit SD (prioritas saja atau yang belum melakukan di jangka panjang)

(++) : Sasaran tercapai di sebagian besar SD

(+++): Sasaran tercapai di seluruh SD

Tabel 4.2 Contoh Tahapan Pencapaian Pembangunan Sanitasi Sekolah

Tahapan pembangunan/pengembangan sanitasi sekolah yang disepakati nantinya menjadi dasar menyusun program dan kegiatan untuk tahun depan (Tahun N+) dan tahun-tahun berikutnya (Tahun N+2 s/d N+4).

Catatan:

Pastikan bahwa sarana/prasarana yang dibangun terintegrasi dengan sistem kota.

- Sarana/prasarana air limbah

Penyediaan toilet harus dipastikan akan ditampung/dibuang ke tanki septic atau sistem komunal agar limbah domestik dari toilet sekolah akan diolah dengan tepat. Pokja harus memastikan bahwa di sistem kota sudah tersedia instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) atau instalasi pengolahan air limbah.

Pastikan juga bahwa kabupaten/kota menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja (tanki septic).

- Sarana/prasana persampahan

Pastikan bahwa kabupaten menyediakan layanan pengangkutan sampah yang dikumpulkan oleh sekolah di TPS sekolah.

Sekolah perlu mempromosikan kegiatan pengurangan sampah di lingkungan sekolah melalui pemilahan. Sangat dianjurkan sekolah mendirikan bank sampah. Dalam pelaksanaannya, pendirian bank sampah dapat merangkul dunia usaha sebagai sponsor/pendukung. Libatkan juga Komite Sekolah.



Fasilitas Cuci Tangan sederhana (tippy tap) di SD Katolik Wee Londa, Sumba Barat Daya, NTT

5. Program dan Kegiatan

TUJUAN

Menyusun program dan kegiatan pembangunan sanitasi sekolah dalam lima tahun

OUTPUT

1. Disepakatinya program dan kegiatan dalam dokumen Strategi Sanitasi Sekolah
2. Teridentifikasinya sumber pendanaan: APBD (DAK, DAU), BOS, BOK, APBD Provinsi, APBN, hibah dunia usaha (CSR)
3. Dituliskannya Bab IV dokumen Strategi Sanitasi Sekolah: Program dan Kegiatan

PELAKSANA

Dinas Dikbud (leading) bersama Pokja

WAKTU/ACARA

Satu bulan – Satu kali rapat Pokja

5.1 Penjelasan

Sekarang kita sudah memiliki strategi yang mungkin saja lebih dari satu strategi yang disepakati untuk dijalankan dalam upaya mencapai sasaran. Strategi boleh dikatakan masih dalam tataran konseptual dan perlu dibumikan dalam tataran praktis, yaitu program dan kegiatan.

Program pada dasarnya adakah sekumpulan kegiatan, dapat bersifat fisik atau non-fisik, yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan-kegiatan dapat dipandang sebagai komponen program yang tidak dapat berdiri sendiri atau dipisahkan satu sama lain. Baik program atau kegiatan harus terukur, terikat waktu, dapat dilaksanakan.

- Program: Idealnya kabupaten/kota hanya memiliki satu program untuk meningkatkan kondisi sanitasi di sekolah. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab dengan hanya punya satu program paka pemerintah daerah dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya pada program secara lebih fokus.
- Kegiatan: Ada dua pendekatan cara menyusun kegiatan (i) Diturunkan langsung dari tujuan dan sasaran sebelum strategi ditetapkan (ii) Diturunkan dari strategi yang ditetapkan. Metoda pertama punya konsekuensi program dan kegiatan yang disusun akan berkembang ke mana-mana, tidak fokus, dan tidak efektif. Sedangkan metoda ke-2 akan lebih fokus.

5.2 Langkah-langkah

5.2.1 Langkah 1: Merumuskan Program

Dalam proses penetapan strategi sebelumnya, kita sudah mengetahui ada kemungkinan Pokja berhasil merumuskan satu, dua, atau maksimum tiga strategi. Namun demikian tidak berarti bahwa kabupaten/kota juga akan menyiapkan program dengan jumlah yang sama. Sebaliknya, karena lokusnya sangat jelas dan terbatas, maka pemerintah daerah dapat menyiapkan satu program yang komprehensif, mencakup seluruh aspek dan komponen, yang bersifat fisik atau non-fisik atau peningkatan kesadaran (PHBS) dan pemberdayaan seperti pemberdayaan warga sekolah. Jadi program dapat dipandang sebagai wadah menampung seluruh kegiatan multi sektor yang komprehensif.

Dinas Dikbud dapat mengusulkan beberapa alternatif program untuk dikonsultasikan dengan anggota-anggota Pokja. Selanjutnya Pokja dapat memintakan persetujuan dari Sekretaris Daerah atau Ketua Bappeda melalui rapat koordinasi di Pokja.

Program-program berikut hanya sekadar contoh untuk dipertimbangkan: “Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Sekolah”, “Program Pengembangan Sanitasi untuk Sekolah Dasar”, dan sebagainya.

5.2.2 Langkah 2: Menyusun Kegiatan

Dalam menyusun kegiatan kita memilih metoda ke-2, yaitu menurunkan kegiatan dari strategi yang ditetapkan. Jika kita memiliki beberapa strategi, misalnya strategi pendanaan, strategi pemberdayaan (penyadartahuan), dan strategi kebijakan, maka Pokja harus menyusun kelompok kegiatan yang merupakan bagian dari masing-masing strategi tersebut.

Namun hendaknya diingat bahwa pengelompokan kegiatan berdasarkan masing-masing strategi tersebut bukan berarti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya justru kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa perencanaan yang dibuat cukup komprehensif, mencakup seluruh aspek, dan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran. Kita tahu dari proses sebelumnya bahwa penetapan sasaran diturunkan secara logis dari tujuan, misi, dan misi.

Adakan rapat kecil yang dipimpin Tim Penyusun Dokumen dengan beberapa anggota Pokja yang dianggap memiliki kapasitas cukup untuk memberikan kontribusi pada penyusunan kegiatan. Selanjutnya dalam rapat tersebut lakukan langkah-langkah di bawah ini:

i. Pahami Strategi

Penyusun dokumen harus memahami strategi yang telah disepakati oleh Pokja. Demikian juga dengan anggota Pokja yang lain. Ini sangat penting agar kegiatan yang disusun nantinya tidak melenceng dari strategi yang ditetapkan. Perlu diingat bahwa strategi adalah segala upaya yang dipandang dapat menyelesaikan sebagian besar masalah atau mencapai tujuan.

ii. Susun Kegiatan untuk Masing-masing Strategi

Susun kegiatan-kegiatan yang relevan untuk setiap strategi. Jika ada dua strategi yang ditetapkan sebelumnya, maka rapat harus menghasilkan dua kelompok kegiatan. Bahas secara berurutan untuk masing-masing kelompok kegiatan.



Pada tahap ini, Pokja tidak perlu terlalu banyak membuat pertimbangan apakah satu kegiatan bisa, mampu, atau mungkin dilaksanakan. Rapat hanya perlu memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan logis, artinya bisa menjawab sasaran dan tujuan yang telah disepakati. Dalam mengusulkan kegiatan sekali lagi Pokja harus tetap merujuk pada Sasaran dan Isu/Permasalahan Strategis yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Pada akhir sesi ini rapat akan menghasilkan tabel seperti ini:

No.	Komponen Sanitasi Sekolah	F/N	Penanggung Jawab	Sumber Dana
1.	Strategi Pemberdayaan Warga Sekolah	N	Dikbud	APBD
1.1	Penataran guru tentang kesehatan lingkungan sekolah	F	Dikbud	APBD
1.2	Produksi dan distribusi materi komunikasi	F/N	Dinkes	
1.3	Kampanye PHBS untuk SD berskala kab/kot	N	Dinkes	APBD/Swasta
1.4	Pelaksanaan pemucuan sekolah (adaptasi STBM)	N	Dinkes	
1.5	ToT untuk pendidikan PHBS di Sekolah	N	Dinkes	
1.6	Kampanye PHBS untuk Sekolah			
	Dst.			
2.	Strategi Kebijakan			
2.1	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Sekolah	N	Bappeda	APBD
2.2	Sosialisasi Perbup tentang Sanitasi Sekolah	N	Bappeda dan Dinkes	APBD
	Dst.			
3.	Strategi Peningkatan Akses Sanitasi			
3.1	Penyediaan Toilet Siswa dan Guru	F	Dikbud	BOS
3.2	Pembuatan DED Saluran Air SD	N	Dinas PU	DAK
3.3	Penyediaan Tempat Sampah	F	Dikbud	Swasta
3.4	Penyediaan TPS di Sekolah	F	Dikbud	Swasta
	Dst.			

Tabel 5.1 Contoh Tabel Usulan Kegiatan Berdasarkan Strategi (asumsi: ada 3 strategi)

Uji sekali lagi satu demi satu apakah usulan-usulan kegiatan tersebut benar-benar berkaitan secara logis dengan upaya mencapai sasaran dan tujuan. Jika ada yang dianggap tidak logis, coba diskusikan ulang apakah usulan tersebut hanya sekadar perumusan yang harus disusun ulang atau bahkan sama sekali harus diganti usulan lain. Pada tahap ini pastikan kegiatan yang diusulkan sudah memenuhi kerangka logis, yakni **Kegiatan – Sasaran – Tujuan**.

iii. Menyusun Kegiatan Berdasarkan Prioritas

Setelah kita mempunyai usulan kegiatan berdasarkan kelompok Strategi secara lengkap, kini saatnya Pokja mendiskusikan bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan. Langkah yang dilakukan sederhana: (i) Pilih/identifikasi Kegiatan Prioritas (ii) Menghitung Kebutuhan (iii) Menyusun Kegiatan Jangka Menengah (iv) Menyusun kegiatan jangka panjang.

Modal Pokja sudah lebih dari cukup. Disamping memiliki Tabel Usulan Kegiatan di atas, Pokja juga telah mengidentifikasi Isu Strategis dan Masalah Mendesak yang dibahas sebelumnya, serta Tabel Usulan Kegiatan Tahun N+1.

Usulan Kegiatan Prioritas. Proses ini pada dasarnya adalah konsolidasi kegiatan *quick-win* (Tahun N+1) ditambah kegiatan Tahun N+2 yang diidentifikasi dari Tabel Usulan Kegiatan Berdasarkan Strategi di atas. Jadi pada dasarnya Kegiatan Prioritas adalah kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada Tahun N+1 dan Tahun N+2. Tahun N+2 masih dianggap sebagai tahun prioritas karena seringkali usulan-usulan prioritas tidak mungkin tertampung pada tahun N+1.

Kriteria kegiatan prioritas didasarkan pada tingkat kerawanan sekolah yang tergambarkan dalam Area Berisiko Sanitasi Kabupaten/Kota, Sekolah dengan Tingkat Berisiko Kesehatan Tinggi, Sekolah di daerah Kumuh, dan sebagainya.

Pada tahap ini Pokja sudah dapat menyusun dengan jelas usulan Kegiatan Prioritas (Tahun N+1 dan Tahun N+2) sebagai bagian dari pelaksanaan program. Bentuk tabelnya kira-kira akan seperti di bawah ini:

No.	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Lokasi	Jumlah	Sumber Dana
1.	Kegiatan Tahun N+1 (Quick-Win Activities)	-> Sumber dana APBD dsb; Fokus di SD-SD di area berisiko			
1.1	Penyediaan Toilet Guru	Dikbud	SD a, b, c, dst	24	APBD, APBN
1.2	Penyediaan Toilet Murid Laki-laki	Dikbud	SD a, b, c, dst	40	APBD
1.3	Penyediaan Toilet Murid Perempuan	Dikbud	SD a, b, c, dst	30	CSR/Swasta
1.4	Penyediaan tempat sampah	Dikbud	SD a, b, c, dst	300	CSR/Swasta
1.5	Pembangunan TPS di Sekolah	Kebersihan	SD a, b, c, dst	15	APBD
1.6	Pencetakan dan Distribusi Poster CPTS	Dinkes	Seluruh SD		BOK
1.7	Pencetakan dan Distribusi buklet 3R di Sekolah	Dinkes	Seluruh SD		APBD
1.8	Pembenahan Saluran Air di Sekolah	Kebersihan	SD b,c, dst		APBD
1.9	Penyediaan Fasilitas Cuci Tangan	Dinkes	SD b, c, dst		CSR/Swasta
1.10	Pelaksanaan pemecuan sekolah (adaptasi STBM)	Dinkes			
1.11	ToT untuk pendidikan PHBS di Sekolah	Dinkes			
1.12	Kampanye PHBS untuk Sekolah				
1.13	Dst				
2.	Kegiatan Tahun N+2	-> Fokus di SD-SD di area berisiko ditambah area rawan lain			
2.1	Penyusunan Perbup tentang Sanitasi Sekolah				
2.2	Penyusunan DED untuk toilet sekolah				
2.3	Penyusunan DED untuk TPS sekolah				
2.4	Penyediaan Toilet Guru	Dikbud	SD e, f, g, h, i, dst	24	APBD, APBN
2.5	Penyediaan Toilet Murid Laki-laki	Dikbud	SD e, f, g, h, i, dst	40	APBD
2.6	Penyediaan Toilet Murid Perempuan	Dikbud	SD e, f, g, h, i, dst	30	CSR/Swasta
2.7	Penyediaan tempat sampah	Dikbud	SD e, f, g, h, i, dst	300	CSR/Swasta
2.8	Pembangunan TPS di Sekolah	Kebersihan	SD e, f, g, h, i, dst	15	APBD
2.9	Pencetakan dan Distribusi Poster CPTS	Dinkes	Seluruh SD		BOK
2.10	Pencetakan dan Distribusi buklet 3R di Sekolah	Dinkes	Seluruh SD		APBD
2.11	Pembenahan Saluran Air di Sekolah	Kebersihan	SD b,c, dst		APBD
2.12	Penyediaan Fasilitas Cuci Tangan	Dinkes	SD b, c, dst		CSR/Swasta
2.13	Pelaksanaan pemecuan sekolah (adaptasi STBM)				
2.14	ToT untuk pendidikan PHBS di Sekolah				
2.15	Kampanye PHBS untuk Sekolah				
2.16	Dst.				

Tabel 5.2 Contoh Tabel Kegiatan Prioritas Tahun N+1 dan Tahun N+2 dalam Rangka Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Sekolah

Menghitung Kebutuhan. Yang dimaksud dengan menghitung kebutuhan ini bukan menghitung kebutuhan dana atau biaya untuk melakukan kegiatan, tetapi hanya membuat perkiraan kebutuhan jumlah/kuantitas infrastruktur sanitasi sekolah yang sifatnya fisik. Misalnya berapa jumlah toilet yang dibutuhkan Sekolah X, berapa untuk murid laki-laki, perempuan, dan guru; berapa jumlah fasilitas cuci tangan yang dibutuhkan, dan sebagainya.

Disamping itu kabupaten/kota dapat menerapkan standar pelayanan minimal sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 1429/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lingkungan Sekolah (pada bagian Lampiran) yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Setiap sekolah diwajibkan mempunyai fasilitas pengolahan limbah domestik. Septic Tank atau IPAL (komunal)
- Setiap sekolah diwajibkan mempunyai sistem penyaluran air limpasan hujan (dan fasilitas CPTS/wudhu) yang terpisah dari saluran limbah domestik
- Setiap sekolah diwajibkan menyediakan tempat sampah layak di tiap-tiap ruangan dan sebuah tempat penampungan sementara (TPS)

Terkait dengan hal di atas, rumus kebutuhan infrastruktur berikut ini ditawarkan hanya sebagai sebuah panduan yang dapat dipakai bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan infrastruktur sanitasi di sekolah.

A. Rumus Menghitung Kebutuhan Toilet Guru

Toilet Guru = 1 per sekolah (Jumlah guru 5-10 orang)
 Toilet Guru = 2 per sekolah (Jumlah guru 11-25 orang) → L+P dipisahkan
 Toilet Guru = 3 per sekolah (Jumlah guru > 26 orang) → L+P dipisahkan

Dengan rumus tersebut kita dapat menyusun tabel seperti di bawah ini sebagai ilustrasi.

Nama SD	Jumlah Guru	Jumlah Guru		Toilet Guru (data saat ini)			Saran Ideal	Gap
		Perempuan	Laki-laki	Campur	Pisah	Tidak ada		
SD 1	16	8	8	1			2	1
SD 2	14	8	6		2		2	0
SD 3	20	12	8		2		2	0
SD 4	10	5	5	2			2	0
SD 5	22	12	10		2		2	0
SD 6	14	6	8		2		2	0
SD 7	7	3	4		2		2	0
SD 8	15	8	7	2			2	0
SD 9	8	3	5			0	2	2

Tabel 5.3 Ilustrasi - Toilet Guru - Layak (Buruk dianggap Tidak Ada/perlu Perbaikan)

B. Rumus Menghitung Kebutuhan Toilet Murid Laki-laki dan Perempuan Dipisahkan

Toilet Siswa = (Jumlah Siswa Laki-laki : 40) + (Jumlah Siswa Perempuan : 25) → SPM sesuai KMK No. 1429/Menkes/2006 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah

Toilet Siswa = (Jumlah Siswa Laki-laki : 60) + (Jumlah Siswa Perempuan : 40) → Alternatif 1

Toilet Siswa = (Jumlah Siswa Laki-laki : 80) + (Jumlah Siswa Perempuan : 50) + Urinoir (2 x Jumlah Toilet Laki-laki) → Alternatif 2

Dengan rumus tersebut kita dapat menyusun tabel seperti di bawah ini sebagai ilustrasi.

SD di Kel. A	Jumlah Siswa Total	Jumlah Siswa		Toilet SiswaGuru (data saat ini)			Saran Alternatif			Gap		
		Perempuan	Laki-laki	Campur	Pisah	Tdk. ada	Toilet Pr.	Toilet Lk.	Tdk. Ada	Toilet Pr.	Toilet Lk.	Tdk. Ada
SD 1	300	140	160	160	4		2.80	2.00	4.00	1		4
SD 2	280	120	160	160	4		2.40	2.00	4.00	1		4
SD 3	400	180	220	220	4		3.60	2.75	5.50	1	2	5
SD 4	200	90	110	110			1.80	1.38	2.75	1		3
SD 5	400	150	250	250			3.00	3.13	6.25	1	1	6
SD 6	250	100	150	150			2.00	1.88	3.75			4
SD 7	150	80	70	70	3		1.60	0.88	1.75	1		2
SD 8	320	140	180	180	6		2.80	2.25	4.50			4
SD 9	160	60	100	100	3		1.20	1.25	2.50			3

Tabel 5.4 Ilustrasi → Toilet Siswa - Layak (Buruk = Tidak Ada/perlu Perbaikan) - Alternatif 2 - Kelurahan A

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk SD dengan jumlah siswa 400 siswa (180 siswa laki-laki dan 220 siswa perempuan), maka hasil perhitungan rumus untuk SD 3 adalah:

- Toilet Siswa = $(180:40) + (220:25) = 4,5$ Toilet Laki-laki dan $8,8$ Toilet Perempuan — Bisa dibulatkan → SPM (KMK No. 1429/2006)
- Toilet Siswa = $(180:60) + (220:40) = 3$ Toilet Laki-laki dan $5,5$ Toilet Perempuan — Alternatif 1
 Toilet Siswa = $(180:80) + (220:50) = 2,25$ Toilet Laki-laki dan $2,25$ Toilet Perempuan dan 5 Urinoir untuk Laki-laki → Alternatif 2

C. Rumus Menghitung Fasilitas Cuci Tangan

Pokja dapat menggunakan rumus berikut untuk menentukan berapa jumlah kran/titik untuk cuci tangan di sekolah.

Jumlah Fasilitas CPTS = Jumlah Kelas (dengan kran/lubang saluran air minimal 10 titik) —> ideal

Jumlah Fasilitas CPTS = Jumlah Kelas : 2 (dengan kran/lubang saluran air minimal 10 titik) —> Agak konservatif

Dengan memakai rumus di atas, maka sebuah sekolah dasar yang memiliki 12 ruang kelas, maka:

- Jumlah Fasilitas CPTS = 12 fasilitas —> ideal
- Jumlah Fasilitas CPTS = $12:2 = 6$ fasilitas —> Agak konservatif

Pokja dapat mengujicobakan perhitungan tersebut berdasarkan rumus di atas untuk seluruh sekolah dasar di daerahnya.

Menyusun Kegiatan Jangka Menengah. Bagian ini sekarang menjadi lebih mudah karena Pokja sudah berhasil menyusun program dan kegiatan untuk tahun N+1 (*quick win*) dan tahun N+2. Yang belum termasuk dalam usulan-usulan tersebut, masukkan sebagai usulan kegiatan jangka menengah (lima tahun), khususnya pada tahun N+3, N+4, dan N+5.

Dengan melihat Formulir Isian Sekolah yang didapat pada tahap proses Pemetaan Sanitasi Sekolah, Pokja dapat membuat proyeksi kebutuhan infrastruktur untuk tiap komponen, identifikasi kebutuhan pemberdayaan, dan kegiatan non fisik. Disamping itu Pokja juga dapat menilai tingkat pengetahuan, kapasitas, kepedulian, dan perilaku warga sekolah yang nantinya berguna sebagai dasar untuk menyusun kegiatan non-fisik seperti pendidikan atau kampanye PHBS.

Susun tabel kegiatan jangka menengah dalam format yang sama dengan tabel Usulan Kegiatan Prioritas. Urutkan berdasarkan tahun dan jika perlu buatlah tabel-tabel tersebut dengan mengelompokkan berdasarkan komponen sanitasi, misalnya: toilet, sampah, sarana cuci tangan, PHBS, dan sebagainya.

Usulan kegiatan jangka menengah harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan Dokumen Sanitasi Sekolah secara berkelanjutan:

- Perluasan kegiatan terkait pendidikan atau kampanye PHBS harus mencakup untuk seluruh sekolah dan warga sekolah
- Peningkatan anggaran terkait kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi sekolah agar terjamin keberlanjutannya
- Pengembangan kebijakan dan peraturan
- Perkuatan kelembagaan warga sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat
- Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi
- Pelibatan dunia usaha dalam kegiatan peningkatan kondisi sanitasi sekolah

Menyusun Kegiatan Jangka Panjang. Bagian ini sangat bergantung pada hasil proses monitoring dan evaluasi selama lima tahun, yakni selama implementasi Dokumen Sanitasi Sekolah. Apakah tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Sanitasi Sekolah sudah tercapai atau masih perlu dilanjutkan beberapa tahun ke depan.

Secara ideal, dalam jangka panjang program dan kegiatan kabupaten/kota terkait peningkatan kualitas lingkungan sekolah harus diarahkan pada pemantapan modalitas yang ada:

- Peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi sekolah
- Penambahan akses sanitasi untuk sekolah yang belum memenuhi standar minimal

Pendidikan PHBS terus-menerus untuk warga sekolah guna menjamin keberlanjutan program. Harus diingat bahwa anggota warga sekolah dari tahun ke tahun akan selalu berubah, banyak siswa baru masuk, pengajar yang berpindah, dan sebagainya.

6. Internalisasi

TUJUAN

1. Internalisasi Kegiatan Prioritas dalam perencanaan/penganggaran formal
2. Internalisasi Kegiatan Jangka Menengah pada seluruh OPD

OUTPUT

1. Tersusunnya RKA (sesuai dokumen) untuk Kegiatan Tahun N+1
2. Tersusunnya RKA untuk Kegiatan Tahun N+2
3. Dipahaminya Kegiatan Jangka Menengah

PELAKSANA

Dinas Dikbud (leading) bersama OPD lain penanggung jawab kegiatan

WAKTU/ACARA

Mengikuti proses perencanaan di daerah (Musrenbang, pembahasan APBD-P, Penetapan KUA-PPAS, penyusunan APBD, dsb.)

6.1 Penjelasan

Setelah berhasil menyusun kegiatan Prioritas (Tahun N+1, N+2) dan kegiatan jangka menengah, tugas selanjutnya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah disusun secara logis tersebut dibahas pada proses perencanaan dan penganggaran formal seperti Musrenbang hingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

OPD penanggungjawab kegiatan harus membawa usulan Kegiatan Prioritas yang ada di dalam Dokumen Sanitasi Sekolah ke dalam proses perencanaan di Musrenbang kabupaten/kota sebagai usulan OPD yang bersangkutan. OPD tersebut harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan yang dimaksud dan mengawalinya dalam proses perencanaan.

Dinas Dikbud dan Pokja selanjutnya menyampaikan kegiatan Jangka Menengah pada seluruh OPD di kabupaten/kota melalui rapat Pokja. Tujuan diadakannya rapat tersebut adalah untuk menyampaikan

Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah dan membangun pemahaman bersama tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan jangka menengah yang akan dilaksanakan di masa depan.

6.2 Langkah-langkah

6.2.1 Internalisasi Kegiatan Prioritas Tahun N+1

Begitu Pokja selesai dengan Tahap/Proses Pemetaan Sanitasi pada Bulan Maret/April dan menetapkan Kegiatan Prioritas yang sifatnya *quick win* (Tahun N+1), masing-masing OPD harus segera menyusun RKA untuk diajukan dalam pembahasan APBD yang biasanya dilaksanakan pada Bulan April hingga Mei. Pastikan usulan kegiatan yang ada di dalam SSK ditransfer menjadi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan numenklatur kegiatan OPD.

Proses													Penanggung Jawab					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5
Pengawasan Penganggaran (APBD)	■	■	■	■	■	■	■	■										
Musrenbang Desa	■													■				
Musrenbang Kecamatan		■												■	■			
Forum OPD – Renja OPD		■	■											■	■			
Musrenbang Kabupaten/Kota			■												■			
Penetapan RKPD				■	■											■	■	
Penetapan KUA-PPAS						■												
Penyusunan RAPBD							■	■	■									

Tabel 6.1 Jadwal Musrenbang dan Penyusunan APBD

Pokja hendaknya mengawal usulan-usulan tersebut antara lain dengan mencatat kegiatan-kegiatan apa saja yang berhasil diakomodasi oleh OPD untuk dibahas lebih lanjut dan mana yang ditolak. Pastikan mengikuti proses perencanaan pembangunan daerah.

Pada akhir penetapan anggaran untuk APBD Tahun N+1, dokumentasikan kegiatan-kegiatan yang akhirnya disetujui untuk mendapat pendanaan APBD. Susun ke dalam tabel sebagai Kegiatan *Quick Win* yang mendapat pendanaan APBD Tahun N+1.

No.	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Lokasi	Jumlah	Sumber Dana
1.	Kegiatan Tahun N+1 (Quick-Win Activities)	-> Sumber dana APBD dan sebagainya			
1.1	Penyediaan Toilet Guru	Dikbud	SD a, b, c, dst	24	BOS
1.2	Penyediaan Toilet Murid Laki-laki	Dikbud	SD a, b, c, dst	40	APBD
1.3	Penyediaan Toilet Murid Perempuan	Dikbud	SD a, b, c, dst	30	CSR/Swasta
1.4	Penyediaan tempat sampah	Dikbud	SD a, b, c, dst	300	CSR/Swasta
1.5	Pembangunan TPS di Sekolah	Kebersihan	SD a, b, c, dst	15	APBD
1.6	Pencetakan dan Distribusi Poster CPTS	Dinkes	Seluruh SD		BOK
1.7	Pencetakan dan Distribusi buklet 3R di Sekolah	Dinkes	Seluruh SD		APBD
1.8	Pembenahan Saluran Air di Sekolah	Kebersihan	SD b, c, dst		APBD
1.9	Penyediaan Fasilitas Cuci Tangan	Dinkes	SD b, c, dst		CSR/Swasta
1.10	Dst.				

Tabel 6.2 Contoh Kegiatan Quick Win (Tahun N+1) dengan Sumber Dana APBD dan non-APBD

Pada contoh di atas usulan Pokja tentang Kegiatan 1.2, 1.3, 1.6, dan 1.8 tidak berhasil mendapatkan pendanaan dalam APBD. Maka Pokja hendaknya menggeser kegiatan-kegiatan tersebut ke Usulan Prioritas Tahun N+2.

Selanjutnya Pokja perlu membuat Tabel Kegiatan *Quick Win* setelah mengeluarkan usulan-usulan yang tidak masuk dalam APBD untuk dimasukkan sebagai tabel dalam Bab V Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah.

Internalisasi usulan Kegiatan Prioritas (Tahun N+1) sangat penting karena sebenarnya sebagian besar permasalahan mendesak/isu strategis yang teridentifikasi harus dilaksanakan pada Tahun N+1.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika proses pembahasan dalam Musrenbang Kabupaten/Kota dimulai adalah: (i) Hendaknya OPD penanggung jawab kegiatan dikawal oleh anggota pokja lain, termasuk dari Dinas Pendidikan (ii) Siapkan indikasi kebutuhan dana untuk setiap usulan (iii) Senantiasa rujuk Dokumen Strategis.

6.2.2 Internalisasi Kegiatan Prioritas Tahun N+2

Setelah melakukan internalisasi usulan kegiatan *quick win*, selanjutnya tugas Pokja adalah mulai mensosialisasikan usulan-usulan tersebut pada OPD terkait. Tujuannya agar dalam proses perencanaan pada Tahun N+2, yang idealnya dimulai sejak dari Musrenbang di tingkat desa/kelurahan/kecamatan hingga kabupaten/kota, pembahasannya bisa lebih lancar. Tahun N+2 masih dipandang strategis dalam implementasi Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah.

Strategi Sanitasi Sekolah mengadopsi proses *bottom up* pada saat Pokja melaksanakan Tahap Pemetaan Sanitasi Sekolah. Oleh karena itu OPD-OPD terkait nantinya tidak perlu lagi membawa usulan-usulan tersebut pada proses Musrenbang Desa/Kelurahan atau Kecamatan.

Sebaliknya, Pokja melalui OPD penanggung jawab kegiatan (berdasarkan Tabel Kegiatan Prioritas Tahun N+2 plus Kegiatan Tahun N+1 tersisa) nantinya hanya perlu melakukan pembahasan dalam Forum OPD. Yaitu ketika membahas Rencana Kerja OPD dan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, penetapan Renja OPD, hingga penetapan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

No.	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Lokasi	Jumlah	Sumber Dana
1.	Kegiatan Tahun N+1 (Quick-Win Activities)	-> Sumber dana APBD dan sebagainya			
1.1	Penyediaan Toilet Guru	Dikbud	SD a, b, c, dst	24	BOS
1.2	Penyediaan Toilet Murid Laki-laki	Dikbud	SD a, b, c, dst	40	APBD
1.3	Penyediaan Toilet Murid Perempuan	Dikbud	SD a, b, c, dst	30	CSR/Swasta
1.4	Penyediaan tempat sampah	Dikbud	SD a, b, c, dst	300	CSR/Swasta
1.5	Pembangunan TPS di Sekolah	Kebersihan	SD a, b, c, dst	15	APBD
1.6	Pencetakan dan Distribusi Poster CPTS	Dinkes	Seluruh SD		BOK
1.7	Pencetakan dan Distribusi buklet 3R di Sekolah	Dinkes	Seluruh SD		APBD
1.8	Pembenahan Saluran Air di Sekolah	Kebersihan	SD b, c, dst		APBD
1.9	Penyediaan Fasilitas Cuci Tangan	Dinkes	SD b, c, dst		CSR/Swasta
1.10	Dst.				
2.	Kegiatan Tahun N+2				
2.1	Penyusunan Perbup tentang Sanitasi Sekolah				
2.2	Penyusunan DED untuk toilet sekolah				
2.3	Penyusunan DED untuk TPS sekolah				
2.4	Penyediaan Toilet Guru	Dikbud	SD e, f, g, h, i, dst	24	
2.5	Penyediaan Toilet Murid Laki-laki	Dikbud	SD e, f, g, h, i, dst	40	BOS
2.6	Penyediaan Toilet Murid Perempuan	Dikbud	SD e, f, g, h, i, dst	30	APBD
2.7	Penyediaan tempat sampah	Dikbud	SD e, f, g, h, i, dst	300	CSR/Swasta
2.8	Pembangunan TPS di Sekolah	Kebersihan	SD e, f, g, h, i, dst	15	CSR/Swasta
2.9	Pencetakan dan Distribusi Poster CPTS	Dinkes	Seluruh SD		APBD
2.10	Pencetakan dan Distribusi buklet 3R di Sekolah	Dinkes	Seluruh SD		BOK
2.11	Pembenahan Saluran Air di Sekolah	Kebersihan	SD b, c, dst		APBD
2.12	Penyediaan Fasilitas Cuci Tangan	Dinkes	SD b, c, dst		APBD
2.13	Dst.				CSR/Swasta

Tabel 6.3 Contoh Kegiatan Quick Win (Tahun N+1) dengan Sumber Dana APBD

Susunlah Kegiatan Tahun N+2 yang secara informal sudah mendapatkan persetujuan OPD dalam Tabel Kegiatan Tahun N+2 (final). Pastikan menyertakan Usulan Kegiatan N+1 yang tidak terangkut dalam Usulan APBD Tahun N+1.

Susunlah Kegiatan Tahun N+2 yang secara informal sudah mendapatkan persetujuan SKPD dalam Tabel Kegiatan Tahun N+2 (final). Pastikan menyertakan Usulan Kegiatan N+1 yang tidak terangkut dalam Usulan APBD Tahun N+1.

Dari tabel di atas terlihat bahwa Usulan Kegiatan Prioritas (Tahun N+2) adalah usulan-usulan yang tidak dibahas pada Tahun sebelumnya ditambah Usulan Tahun N+2 yang dihasilkan pada saat menyusun kegiatan. Tabel final inilah yang ditampilkan dalam Dokumen Strategi Sanitasi Sekolah sebagai kegiatan Tahun N+2.

6.2.3 Sosialisasi Kegiatan Jangka Menengah

Seperti halnya pada Usulan Kegiatan Tahun N+2, pada tahap ini Pokja bukan melakukan proses internalisasi Strategi Sanitasi Sekolah pada proses perencanaan/penganggaran formal, tetapi Pokja hanya melakukan sosialisasi.

Yang dimaksud dengan sosialisasi adalah upaya Pokja menginformasikan dan membangun kesepahaman dengan OPD tentang Usulan Kegiatan Jangka Menengah (Tahun N+3, N+4, N+5). Proses ini dilakukan bersamaan dengan sosialisasi Usulan Tahun N+2 pada saat acara Rapat Konsultasi Pokja.

Pokja membuat ringkasan dari Tabel Usulan Kegiatan Jangka Menengah yang diperoleh pada tahap sebelumnya sebagai bahan presentasi. Catat input dan pertanyaan yang muncul dari rapat tersebut dan pastikan hasilnya didokumentasikan di dalam Dokumen Sanitasi Sekolah yang tengah disusun.

7. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi

TUJUAN

1. Menyiapkan Kerangka Pemantauan Implementasi Strategi Sanitasi Sekolah
2. Menyiapkan Kerangka Kerja Evaluasinya

OUTPUT

1. Tersusunnya Kerangka Kerja Pemantauan Kegiatan Sekolah
2. Tersusunnya Kerangka Kerja Pembangunan Sanitasi Sekolah
3. Tersusunnya Rencana Kerja Monev Tahun N+1

PELAKSANA

Dinas Dikbud (leading) bersama SKPD lain penanggung jawab kegiatan

WAKTU/ACARA

Diskusi dan Pertemuan Konsultatif dengan anggota Pokja/SKPD

7.1 Penjelasan

Untuk mengetahui sejauh mana dokumen Strategi Sanitasi Sekolah diimplementasikan, Pokja harus melakukan pemantauan (monitoring) sejak Tahun N+1 dan seterusnya. Disamping itu Pokja juga harus mengetahui dengan pasti keberhasilan, hambatan, dan kendala pelaksanaan pembangunan sanitasi sebagai pelajaran yang digunakan untuk evaluasi implementasi di tahun-tahun selanjutnya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ini harus menjadi agenda tahunan Pokja. Ada baiknya kegiatan ini diintegrasikan dengan kegiatan/agenda Monev PPSP yang dilaksanakan Pokja AMPL/Sanitasi dan sudah berjalan beberapa tahun di kabupaten/kota.

Pada bagian ini Pokja akan diberikan pemahaman tentang bagaimana membuat kerangka kerja monitoring dan evaluasi di tingkat sekolah dan di tingkat kabupaten/kota. Disamping itu, bersamaan dengan penyetaraan rencana kerja Pokja di tahun berikutnya, rencana monev ini juga harus dibahas dan ditetapkan.

7.2 Langkah-langkah

Yang dimaksud dengan Kerangka Kerja Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada bagian ini adalah metoda/langkah-langkah untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi sekolah dicapai serta menjangkau umpan balik yang dapat dipakai sebagai dasar melakukan evaluasi. Proses monitoring dilakukan di tingkat sekolah dan dikonsolidasikan di tingkat kabupaten/kota oleh Pokja, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu anggotanya.

Kerangka Kerja Pemantauan Pembangunan Sanitasi Sekolah sekurang-kurangnya mencakup beberapa aspek: (i) penetapan kriteria (ii) penugasan dan penetapan penanggung jawab kegiatan (iii) lingkup dan pelaporan (iv) mekanisme umpan balik, yang merupakan bagian dari kegiatan evaluasi.

7.2.1 Langkah 1: Penetapan Kriteria

Kriteria yang diukur dalam Kerangka Kerja Monev di sini ada dua hal.

- Di tingkat sekolah indikator yang dipantau adalah: toilet siswa dan guru, tempat sampah dan TPS, penyaluran air, dan fasilitas cuci tangan dan berwudhu.
- Di tingkat Pokja/OPD, indikator yang dipantau adalah kesesuaian RKA, DPA, dan realisasinya. Keduanya dilakukan berjenjang dan nantinya dikonsolidasikan oleh Pokja.

Pada Tahun N+1, sekolah dapat menggunakan tabel penilaian mandiri (*self assessment*) kondisi sanitasi sekolah seperti yang diperkenalkan sebelumnya dengan mengisi nilai skor yang diminta, terlepas sekolah tersebut mendapatkan intervensi atau tidak.

Komponen	Ya/Tdk	Skor	Nilai	Komponen	Ya/Tdk	Skor	Nilai
Toilet Guru		75.0%	Baik	Fasilitas Cuci Tangan		66.7%	Cukup
Dipisah L & P	YA			Tersedia	YA		
Tersedia Air Memadai	YA			Tersedia Sabun	YA		
Selalu Bersih	TIDAK			Sesuai Jumlah Kelas/Lebih banyak	TIDAK		
Terhubung ke Septic Tank/IPAL	YA			Pengelolaan sampah		40%	Buruk
Toilet Murid		33.4%	Buruk	Tersedia tempat sampah per ruangan	YA		
Dipisah L & P	YA			Sampah dibersihkan setiap hari	YA		
Jumlah Toilet P sesuai 1:50	TIDAK			Setiap ruang disapu/pel tiap hari	TIDAK		
Jumlah Toilet L sesuai 1:60	YA			Tersedia TPS	TIDAK		
Tersedia Air Memadai	TIDAK			TPS diangkut maksimum 3 per hari	TIDAK		
Selalu Bersih	YA			Saluran Air		75%	Baik
Terhubung ke Septic Tank/IPAL	YA			Saluran air dari fasilitas Cuci Tangan	YA		
Sumber air Bersih		66.7%	Cukup	Saluran air dari Kamar Mandi (bukan toilet)	YA		
Tersedia Sumber Air (lihat Tabel 3.2)	YA			Saluran air utk. menampung limpasan hujan	YA		
Tersedia Sepanjang Hari	YA			Saluran selalu dibersihkan	TIDAK		
Kualitasnya Bagus	TIDAK			Tabel 7.1 Ilustrasi Formulir Monev Kondisi Sanitasi oleh Sekolah (per Sekolah)			
Fasilitas terkait Menstruasi		66.7%	Cukup				
Tersedia Tempat Sampah (menstrual)	YA						
Tersedia Cermin	YA						
Tersedia Gantungan	TIDAK						

Setiap sekolah mengisi Formulir Monev di atas, Pokja akan mengkonsolidasikannya bersama dengan hasil pemantauan atas implementasi Dokumen Perencanaan Strategis di Tahun N+1. Praktiknya, kegiatan ini adalah memeriksa apakah rencana kegiatan yang ada dalam Dokumen Perencanaan Sanitasi Sekolah berhasil diusulkan ke dalam RKA, DPA, dan direalisasikan dalam sebuah kegiatan.

Terkait dengan ini Pokja dapat menggunakan Formulir berikut sebagai alat untuk melakukan kegiatan monev sanitasi sekolah.

No.	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Lokasi	Jumlah	Sumber Dana	DPA	Realisasi
1.1	Penyediaan Toilet Guru	Dikbud	SD a, b, c, dst	24	BOS	V	?
1.4	Penyediaan tempat sampah	Dikbud	SD a, b, c, dst	300	CSR/Swasta	V	?
1.5	Pembangunan TPS di Sekolah	Kebersihan	SD a, b, c, dst	15	APBD	V	?
1.7	Pencetakan/Distribusi buklet 3R	Dinkes	Seluruh SD		APBD	V	?
1.9	Penyediaan Fasilitas Cuci Tangan	Dinkes	SD b, c, dst		CSR/Swasta	V	?
1.10	Dst.						

Tabel 7.2 Ilustrasi Formulir Monev Kegiatan Sanitasi oleh Pokja

pembahasan APBD Tahun N+2 bersama-sama dengan usulan kegiatan Tahun N+1 yang tidak masuk dalam pembahasan APBD Tahun N+1 (lihat bagian sebelumnya).

7.2.2 Langkah 2: Penugasan dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pokja harus membahas siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan monitoring atau pemantauan. Seperti sudah dibahas di atas, baik Pokja maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, keduanya bertanggung jawab melakukan pemantauan dengan lingkup masing-masing. Namun demikian, penanggung jawab koordinasi dan penyiapan formulir monitoring serta distribusinya harus disiapkan oleh Pokja.

Demikian juga Pokja juga bertanggung jawab membuat jadwal dan membuat konsolidasi formulir monitoring, yang nantinya menjadi bahan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi Sekolah.

7.2.3 Langkah 3: Evaluasi

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan berhasil dilaksanakan, hambatan, dan kendala. Aspek yang ditinjau juga harus komprehensif, mulai dari: aspek kebijakan, kelembagaan, kapasitas SDM, pendanaan, aspek teknis, dan aspek perilaku. Dengan identifikasi faktor-faktor tersebut selanjutnya Pokja dapat membuat atau meninjau kembali usulan kegiatan di tahun berikutnya.

7.2.4 Langkah 4: Lingkup Laporan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi Sekolah sebaiknya merupakan bagian dari Laporan Pembangunan Sanitasi Kabupaten/Sekolah. Dengan demikian, pelaksanaan dan penyelesaiannya juga harus disinkronkan agenda Pokja secara keseluruhan.

Paling tidak ada tiga hal yang harus menjadi substansi laporan Monev Sanitasi Sekolah.

- Pertama adalah yang terkait komponen fisik (sarana dan prasarana); sejauh mana usulan kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Strategi Sanitasi Sekolah telah dilaksanakan, berapa infrastruktur telah dibangun/diperbaiki dan berapa yang masih dibutuhkan, serta proyeksi kebutuhan biaya untuk melaksanakan kegiatan tersisa.
- Kedua adalah yang terkait komponen PHBS; dari hasil *self-assessment* sekolah dan penilaian Pokja/OPD, harus dilaporkan bagaimana kondisi PHBS warga sekolah pada umumnya. Laporan harus menjelaskan tahapan PHBS mulai dari: pengetahuan, kesadaran, dan perilaku/aksi warga sekolah. Akan sangat bermanfaat jika digambarkan berdasarkan kelurahan.
- Ketiga adalah yang terkait dengan umpan balik dan evaluasi. Yang dimaksudkan adalah apakah implementasi Dokumen Perencanaan Strategi Sanitasi Sekolah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Di sini Pokja harus dengan mendetail menjelaskan faktor keberhasilan, hambatan, dan kendala implementasi pembangunan sanitasi sekolah yang mencakup berbagai aspek yang disebut di atas.





